

**ANALISIS MOTIF KOALISI PARTAI POLITIK DALAM  
MENGHADAPI PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

**(Studi pada Koalisi Partai NasDem, PKS dan Hanura Provinsi Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

Iranda Putri



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS MOTIF KOALISI PARTAI POLITIK DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 (Studi pada Partai NasDem, PKS dan Hanura Provinsi Lampung)**

Oleh:

**IRANDA PUTRI**

Menuju pemilihan Gubernur (pilgub) Lampung 2018, Partai NasDem, PKS dan Hanura berkoalisi mendukung Mustafa – Ahmad Jazuli. Koalisi ini terutama terjalin dikarenakan adanya syarat minimum jumlah kursi legislatif atau suara sah dari partai politik dan gabungan partai politik yang diajukan dalam undang-undang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah motif koalisi partai politik dalam menghadapi pilgub Lampung tahun 2018. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan melibatkan kader partai NasDem, PKS dan Hanura, pengamat politik dan wartawan senior sebagai narasumber. Koalisi yang seharusnya terjadi adalah koalisi yang sifatnya ideologis namun saat ini hampir semua koalisi sifatnya pragmatis. Hasil penelitian ini adalah koalisi antara NasDem, PKS dan Hanura sifatnya pragmatis dengan mengedepankan kepentingan masing-masing partai seperti pemenuhan kebutuhan untuk mencukupi syarat yang diajukan undang-undang, menghasilkan calon kepala daerah yang mumpuni, memiliki peluang kemenangan tinggi baik untuk pilgub 2018 maupun pemilu 2019. Bentuk pragmatisme dari koalisi ini yaitu NasDem menempatkan kadernya sebagai calon gubernur, PKS menempatkan kadernya sebagai calon wakil gubernur dan Hanura mendapat kesempatan penuh untuk berkampanye meningkatkan eksistensi internal partai dan juga menyalurkan program-program partainya dalam koalisi ini.

**Kata kunci: Pilgub Lampung, Partai Politik, Pragmatisme.**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF POLITICAL PARTIES'S COALITION MOTIVES FOR FACING LAMPUNG'S GOVERNOR ELECTION IN 2018 (Case Study on Coalition between NasDem, PKS and Hanura of Lampung Province)**

By:

IRANDA PUTRI

Facing Lampung's governor election in 2018, NasDem, PKS and Hanura coalition support Mustafa - Ahmad Jazuli. This coalition is primarily intertwined due to the minimum requirement of the number of legislative seats or the legal votes of the political parties and the coalition of political parties proposed in the law. The purpose of this research is to find out whether the political party coalition motive in facing Lampung's governor election in 2018. This research type is descriptive with qualitative approach by involving cadre of NasDem, PKS and Hanura, political observer and senior journalist as interviewees. The coalition should be based on ideology but right now almost all of coalition based on pragmatism. The result of this research is a coalition between NasDem, PKS and Hanura is pragmatic by prioritizing the political interests or party of each party such as fulfillment of requirement to fulfill requirement of law, yielding candidate of head of region which have qualified, have a high chance of winning good for Lampung's governor election in 2018 as well as the 2019 election. The pragmatism form of this coalition is that NasDem puts its cadre as a candidate for governor, the PKS places its cadre as a vice-governor candidate and Hanura gets full opportunity to campaign to improve the party's internal existence and also showed its party programs in this coalition.

**Keywords: Lampung's Governor Election, Party Politics, Pragmatism.**

**ANALISIS MOTIF KOALISI PARTAI POLITIK DALAM MENGHADAPI  
PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018  
(Studi pada Koalisi Partai NasDem, PKS dan Hanura Provinsi Lampung)**

**Oleh:**

**IRANDA PUTRI**

**Skripsi**

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar  
**SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS MOTIF KOALISI PARTAI  
POLITIK DALAM MENGHADAPI  
PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG  
TAHUN 2018  
(Studi pada Koalisi Partai NasDem,  
PKS dan Hanura Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Tranda Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1416021052

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Dr. Suwondo, M.A.**  
NIP 19590903 198503 1 002

**Darmawan Purba, S.IP., M.IP.**  
NIP 19810601 201012 1 003

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**  
NIP 19611218 198902 1 001

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

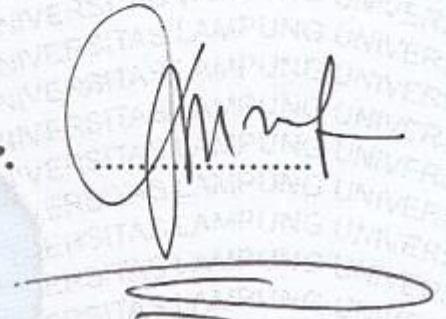
Ketua

: **Dr. Suwondo, M.A.**



Sekretaris

: **Darmawan Purba, S.IP., M.IP.**



Penguji

: **Syafarudin, S.Sos., M.A.**



### 2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. Syarif Makhya, M.Si.**

**NIP 19590803 198603 1 003**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 Februari 2018**

## PERNYATAAN

Dengan karya ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 Februari 2018

Yang membuat pernyataan



**Iranda Putri**  
NPM. 1416021052

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Iranda Putri, dilahirkan di Bandar Lampung pada 28 Desember 1996. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara putri dari Bapak H. Ichsan Solihin dan Hj. Herida Dahlia, S.Pd. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tahun 2001-2002 di TK Kartika II-27 Bandar Lampung, dilanjutkan di SD Kartika II-5 Bandar Lampung pada tahun 2002-2008.

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di RSBI SMPN 1 Bandar Lampung tahun 2008-2011 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 12 Bandar Lampung tahun 2011 kemudian pindah ke SMAN 9 Bandar Lampung tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan tahun 2014.

Selama masa perkuliahan penulis pernah berhimpun dalam beberapa organisasi. Penulis pernah menjadi Anggota Muda LSSP Cendekia FISIP Unila tahun 2014-2016, menjadi Anggota Biro Kajian dan Keilmuan HMJ Ilmu Pemerintahan tahun



2015-2016, menjadi Anggota Biasa di LSSP Cendekia FISIP Unila dan Ketua Biro Kajian dan Keilmuan HMJ Ilmu Pemerintahan tahun 2016-2017.

Penulis juga pernah menjadi anggota Laboraturim Politik Lokal dan Otonomi Daerah FISIP Unila pada tahun 2016 dan menjadi asisten dosen di beberapa mata kuliah seperti; Ekologi Pemerintahan, Teori Pembangunan, Politik Keuangan Daerah, Metodologi Ilmu Politik dan Pemerintahan dan Metode Penelitian Kualitatif. Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari di Desa Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.

## MOTTO

*“Fainna ma'a al'usri yusran. Inna ma'a al'usri yusran”*

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS Al-Insyiah [94]: 5-6)

“Amalan yang dicintai Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit”

(HR Bukhari dan Muslim)

*“When you succeed, you earn something. When you fail, you also earn something. You need both in your life”*

(Dr. Bilal Philips)

“Keberhasilan adalah sebuah istana, ridho Allah adalah atapnya, doa ibu dan ayah adalah tiangnya, kasih sayang keluarga adalah fondasinya dan usaha serta semangat diri sendiri adalah pintu masuknya”

(Iranda Putri)

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamduillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,  
Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan tepat waktu

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW  
Semoga Kelak Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta serta kakakku dan adikku yang ku sayangi sebagai  
tanda bakti, hormat dan cintaku.

Terima kasih atas doa dan restu serta semangat yang telah kalian berikan.

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,  
semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi yang berjudul “Analisis Motif Koalisi Partai Politik Dalam Menghadapi Pilgub Lampung Tahun 2018 (Studi pada Koalisi Partai NasDem, PKS dan Hanura Provinsi Lampung)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta, H. Ichsan Solihin dan Hj. Herida Dahlia, S.Pd atas segala doa, cinta dan kasih sayang, dukungan dan semangat serta perhatian yang terus mengalir dan tak mampu penulis balas segala jasa dan kebaikannya, Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan dan kasih sayang-Nya serta balasan atas segala jasa dan kebaikan Ibunda dan Ayahanda.

2. Kakak dan adik kandung penulis, Novi Yanti, S.P., M.Si. dan Praja IPDN XVIII Muhammad Irvan serta kakak ipar penulis, Akhmad Mirza Kurniawan, S.H dan dua orang keponakan penulis, Fathir Raqilla Dzakwan dan Queenzha Atha Shaquila. Terima kasih atas segala doa dan semangat serta cinta dan kasih sayang yang diberikan, semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kekuatan dan kemudahan dalam segala urusan sehingga kita mampu menjadi anak yang membanggakan orang tua kita.
3. Bapak Dr. Suwondo, M.A. selaku pembimbing utama penulis namun terkendala karena sakit, semoga segera diberikan kesehatan dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT agar mampu berkatifitas kembali seperti biasanya.
4. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku pembimbing pengganti untuk penulis. Terima kasih ilmu, saran, semangat dan motivasi guna terciptanya skripsi ini, terima kasih juga atas kebaik dan rasa pengertian yang tinggi terhadap penulis yang bapak berikan. Semoga jiwa muda akan selalu tertanam dalam diri bapak dan segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
5. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP. selaku pembimbing kedua. Terima kasih atas kesabaran untuk meluangkan waktu dalam menghadapi penulis, atas segala bimbingan ilmu, saran yang sangat bermanfaat serta motivasi dan semangat untuk menghasilkan skripsi yang baik dan benar sehingga atas kebaikan bapak, penulis mampu menyelesaikan skripsi dan studi tepat pada waktunya. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

6. Bapak Syarifudin, S.Sos., M.A. selaku dosen pembahas. Terima kasih atas segala kritik dan saran yang membangun demi terciptanya progres yang signifikan terhadap skripsi penulis hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
7. Bapak Drs. Yana Ekana, PS, M.Si. (alm) selaku dosen yang sangat berarti bagi penulis sejak masa awal perkuliahan. Terima kasih telah menjadi sosok yang sangat penulis kagumi, tulus menyayangi, mengerti dalam segala kondisi, sangat menghargai dan mengapresiasi. Terima kasih atas segala kesenangan, keceriaan, waktu berbagi dalam segala hal serta semangat dan motivasi yang akan selalu penulis ingat sebagai kenangan indah meski bapak telah tiada. Lantunan doa senantiasa penulis kirimkan untuk bapak, semoga Allah SWT lapangkan dan terangkan tempat istirahat bapak dan semoga bapak mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Skripsi ini juga penulis persembahkan untuk bapak sebagai bukti segala kebaikan yang bapak berikan mampu memberikan hasil yang luar biasa bagi penulis dan sebagai bukti penulis mampu mewujudkan salah satu harapan bapak.
8. Seluruh dosen dan Staf Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan sehingga mampu menjadi jendela wawasan bagi penulis di masa kini dan di masa yang akan datang. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak dan ibu baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

9. Sahabatku, saudaraku, dan orang termager yang selalu ada sejak penulis menjadi mahasiswa baru. Aziza Novirania, terima kasih atas segala kenangan yang indah, rasa makanan enak tempat kita sering makan, film-film barat yang tidak penulis pahami dimana bagusnya tapi yang penting kita tonton karena ngikutin zaman, terima kasih atas segala waktu yang telah diluangkan baik waktu sibuk ataupun gabut, segala kasih sayang yang telah diberikan dan segala pikiran yang telah dicurahkan. Terima kasih untuk selalu ada bersama penulis, selalu mendengarkan dan memberikan motivasi kepada penulis dalam segala keadaan, telah sabar menghadapi penulis yang bikapal ini dan telah mengisi hari-hari perkuliahan penulis tanpa absen. Semoga Allah SWT selalu melindungimu dimanapun kau berada, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan dan dapat mencapai kesuksesan.
10. Sahabatku, teman bertengkarku, manusia yang tidak pernah marah ketika dimarah, M. Dhian Bagus Aprian. Terima kasih atas segala kenangan, keceriaan, kasih sayang, bantuan dan segalanya yang telah diberikan. Terima kasih juga telah sering membuat penulis marah namun mampu melupakan amarah karena kelakuan idiotmu, terima kasih telah siaga menjadi kakak yang baik bagi penulis dan selalu sabar menghadapi penulis. Semoga Allah SWT selalu dimanapun kau berada, selalu diberikan kemudahan dan kesuksesan dalam segala urusan. Segera dibuat skripsinya gus, kamu sudah terlalu tua untuk tetap berada di kampus.
11. Sekelompok teman-teman pance yang dulu pernah bersama, pecah belah seperti piring kemudian bersama lagi, hehe. Nosi Marisa, Shinta Silvia Novianna, M. Wiryawan Saputra, Dhian Kurniawan. Terima kasih atas

segala kenangan, waktu kebersamaan, kasih sayang, keceriaan, kesedihan, keterlambatan setiap mau jalan, kepacean setiap membuat janji, kealayan dalam percintaan, kekompakan serius belajar bersama dan solat tahajud menjelang ujian (tapi pas maba aja, astaghfirullah..). Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dimanapun kalian berada.

12. Kgs. Faisal Fathurrahman, terima kasih atas segala waktu, pengalaman, keceriaan dan kesabaran. Terima kasih sudah setia menjadi sahabat penulis hingga saat ini. Semoga perjalanan hijrahmu menjadi amalan mu, semoga penulis juga bisa memperbaiki diri dan mendapatkan hidayah untuk hijrah.
13. Abang-abangan dan mba-mbaan di jurusan Ilmu Pemerintahan, Rifky Febrihanuddin, S.IP., Yogi Noviantama, S.IP., Ricky Adrian, S.IP., M.IP. Danang Marhaens, S.IP., Ananda Putri Sujatmiko, S.IP., Restiani Damayanti, S.IP., Putri Apriodhite, S.IP., Kenn Sindy, S.IP., terima kasih atas segala kenangan, amarah saat menjadi komdis, kebaikan saat menjadi tim kesehatan serta nasi bungkus isi calon ayam alias telur saat menjadi tim konsumsi, terima kasih atas waktu, ilmu, motivasi dan keceriaan yang diberikan terutama atas kesabaran dalam menghadapi penulis, hehe.
14. Teman-teman Ilmu Pemerintahan 2014, Gita, Fatia, Dita, Nyunyun, Mike, Debby, Asfhira, Elvina, Mega, Ana, SyahriniDhian, Bella, Mirani, Sita, Priska, Anul, Depoy, Umayya, Miss, Silvi, Icha, SintaPP, Nia, SintaKetum, Elyta, Ulfa, Alvilia, Intan, AbuUci, Redhi, Madon, Akbar, Aldin, Komang, Bayu, Ujang, Iqbal, Billy, Andri, Shohib, Double Wahyu, Yudi Komti, Sandi, Yoga, BungRidho, Aldi, Ezio, Indra, Fedry, Ferdian, Eliyas, Syahrul, Adlul, Nurcahyo, Gustiansyah, AditNgantuk dan teman-teman lain mohon



maaf tidak bisa tulis semua nanti yang baca paleng, hehe. Semoga kita semua menjadi sarjana dengan predikat memuaskan, terima kasih atas segala kenangan dan kasih sayang selama hampir 4 tahun kebersamaan.

15. Adik-adik yang sangat penulis sayangi sebagai sebuah geng lambe turah yang hobi gosip, Khairunnisa Maulida, Tri Ayu Sartika Zanti, Lanina Aprilia, Ara Arilia, Selvi Sancia, Restita Amalia, Ria Putri Wahyuni dan Mia Nophita. Terima kasih atas segala kenangan, segala pujian sekaligus hinaan, kasih sayang, waktu mendengarkan dan didengarkan, motivasi dan gosip yang kalian berikan sehingga menjadi semangat penulis dalam menulis skripsi. Maaf penulis tidak menuliskan gelar karena penulis sedang malas, jika mau kalian bisa tulis sendiri pakai pena hasil curian dari teman.
16. Adik-adik yang mengisi hari-hari perkuliahan penulis, Fadel A. Darmawan (calon Bupati Tanggamus, paling bikin paleng, paling banyak mau, tapi juga paling membantu dalam skripsi ini, hahaha), Aca, Elen, Dara, Putri, Untsa, Fani, Meisandra, Dana, Icha, Ridho, Zukhrova, Riyo, Raihan, Ade, Hengki, Henda, Bagas, Arif, Robi, Prasetyo, Ni Kadek, Oktadila, Gita, Amelisa, Luki. Terima kasih sudah menjadi dedek-dedek emesh yang memberikan kenangan manis hasss, keceriaan, onyah-onyah dan kasih sayang sebagai saudara terhadap penulis, krik. Siap-siap ketemu kapita dek, hehe.
17. Sahabatku, manusia-manusia penuh kehedonan. Niki Kusuma Wardani Hidayat (Allahuakbar namanya), Zafira Uswatun Hasanah (dokter yang cemas), Rahmat Rizky Maulana (dompet berjalanku), Diah Anggraini (yang paling jarang pulang) dan Muhammad Fadhli Megatron (pria multitalenta). Pokoknya makasih lah nanti kata-kata manisnya dibelakang layar aja.

18. Cinta-cinta penulis yang selalu setia menjadi sahabat penulis sejak penulis alay dan sampai saat ini penulis juga masih alay. Kamilia Kadarina, S.Pd. dan Alysa Fitri Wijaya, S.Pd. sengaja penulis tuliskan gelar agar kalian segera sarjana dan mencoba merasakan hidup normal tak alay lagi. Penulis cinta kalian banget para bu guru pance.
19. Teman hidup penulis selama 40 hari KKN, Kurnia Ramadhani, S.P., Titin Aprilia, S.Si., Rahma Ferika, S.T., Muhammad Khadafi, S.H., Rama Wicaksa, S.Hut., Yudhistira, S.A. Terima kasih sudah menjadi keluarga bagi dan sabar menghadapi penulis yang tidur pagi bangun siang ini. Semoga silaturahmi selalu terjalin dan jangan lupa karaokean di Charlie ya.
20. Terakhir, terima kasih banyak kepada Muchammad Dhean Pratama yang selalu ada untuk penulis sejak hari pertama menjadi mahasiswa. Orang yang telah meluangkan banyak waktunya bagi penulis hingga selesainya masa studi penulis, yang sealalu ada bersama penulis dalam keadaan senang ataupun sedih, yang mengisi hari dan hati penulis tanpa absen (cieee..). Terima kasih atas peran dan sosok mu yang sangat berarti bagi penulis yang sabar sebagai *human diary* yang tak pernah bosan mendengar semua keluah kesah penulis, semoga *mobile legend* di hp mu segera musnah, skripsi mu segera selesai, segera kau dapatkan kesuksesan untuk meraih mimpi-mimpimu. Semoga Allah SWT selalu melindungimu dimanapun kau berada.

Bandar Lampung, 21 Februari 2018

Iranda Putri

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	16
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
A. Tinjauan tentang Partai Politik .....	18
1. Pengertian Partai Politik .....	19
2. Fungsi Partai Politik.....	21
3. Tipologi Partai Politik.....	24
4. Pembagian Arena Kompetisi Partai .....	27
5. Pragmatisme Partai Politik.....	28
6. Pembilahan Sosial dan Ideologi Partai Politik.....	29
B. Tinjauan tentang Koalisi Partai Politik .....	32
1. Pengertian Koalisi Partai Politik.....	33
2. Sumber Daya Koalisi Partai Politik. ....	34
3. Teoritikal Terbentuknya Koalisi Partai Politik .....	34
4. Motif Koalisi Partai Politik.....	35
C. Tinjauan tentang Pemilihan Gubernur (Pilgub) .....	37
1. Pengertian Pemilihan Gubernur (Pilgub).....	37
2. Aras dan Sistem Pemilihan Umum .....	39
3. Pemilihan Kepala Daerah .....	39
D. Kerangka Pikir .....	41
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	44
A. Tipe Penelitian .....	44
B. Fokus Penelitian .....	45
1. Motif Koalisi Ideologis (Abraham De Swaan).....	46

2. Motif Koalisi Pragmatis (Kartz dan Mair).....	46
C. Informan .....	47
D. Jenis dan Sumber Data .....	48
1. Data Primer .....	49
2. Data Sekunder .....	49
E. Teknik Pengumpulan Data .....	50
1. Wawancara.....	51
2. Observasi .....	52
3. Dokumentasi .....	53
F. Teknik Pengolahan Data.....	53
1. Editing.....	54
2. Interpretasi .....	54
G. Teknik Analisis Data .....	54
1. Reduksi Data.....	55
2. Penyajian Data .....	55
3. Verifikasi Data.....	55
H. Teknik Validasi Data .....	56
1. Derajat Kepercayaan.....	56
2. Keteralihan.....	57
3. Kebergantungan .....	57
4. Kepastian .....	57
<b>IV. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN</b> .....	<b>58</b>
A. Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) .....	58
B. Sejarah Pemilihan Gubernur (Pilgub) Langsung Provinsi Lampung.....	59
1. Pilgub Langsung Provinsi Lampung Tahun 2008 .....	59
2. Pilgub Langsung Provinsi Lampung Tahun 2014 .....	61
3. Pilgub Langsung Provinsi Lampung Tahun 2018 .....	64
C. Partai NasDem.....	65
1. Visi Partai NasDem .....	66
2. Misi Partai NasDem.....	66
3. Tujuan Partai NasDem.....	67
4. Fungsi Partai NasDem .....	67
5. Struktur Kepengurusan Partai NasDem DPW Lampung....	68
D. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) .....	69
1. Visi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) .....	69
2. Misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) .....	70
3. Tujuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) .....	70
4. Fungsi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) .....	70
5. Struktur Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPW Lampung .....	71
E. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) .....	72
1. Visi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) .....	73
2. Misi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) .....	73
3. Tujuan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) .....	73
4. Fungsi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) .....	74
5. Struktur Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat	75

(Hanura) DPD Lampung.....	
F. Analisis Ideologi Partai Pendukung dan Partai Pengusung Mustafa – Ahmad Jazuli .....	76
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	78
A. Ideologi.....	85
B. Tujuan.....	95
C. Refleksi Teoritik: Masalah Dalam Koalisi Pragmatis .....	124
<b>VI. SIMPULAN DAN SARAN</b>	131
A. Simpulan.....	131
B. Saran .....	132

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Hasil Perolehan Suara 12 Partai Politik pada Pemilu Legislatif Provinsi Lampung 2014 .....	3
Tabel 2. Jumlah Kursi Partai Politik Dalam Parlemen (DPRD Provinsi Lampung) tahun 2014-2019 .....	4
Tabel 3. Tabel Silang Pemetaan Koalisi Partai Politik pada Pilkada Serentak Beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung Tahun 2015.....	8
Tabel 4. Tabel Silang Pemetaan Koalisi Partai Politik pada Pilkada Serentak Beberapa Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2017 .....	10
Tabel 5. Penelitian Terdahulu dan Sejenis .....	14
Tabel 6. Fungsi Partai Dalam Negara Demokrasi .....	24
Tabel 7. Data Informan Dalam Penelitian .....	48
Tabel 8. Perolehan Suara Pilgub Langsung Provinsi Lampung Tahun 2008.....	60
Tabel 9. Perolehan Suara Pilgub Langsung Provinsi Lampung Tahun 2014.....	63
Tabel 10. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2019-2024 .....	65
Tabel 11. Struktur Pengurus Partai NasDem DPW Lampung	68
Tabel 12. Sktruktur Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPW Lampung .....	71
Tabel 13. Struktur Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPD Lampung .....	75
Tabel 14. Triangulasi Data Penelitian .....	79
Tabel 15. Triangulasi Wawancara Indikator Ideologi .....	110
Tabel 16. Triangulasi Wawamcara Indikator Tujuan.....	112
Tabel 17. Hasil Penilaian terhadap Motif Koalisi Partai Politik .....	114
Tabel 18. Struktur Tim Pemenangan Mustafa – Ahmad Jazuli.....	119
Tabel 19. Proses Koalisi antara Partai NasDem, PKS dan Hanura .....	124
Tabel 20. Sikap Partai Politik Pendukung Mustafa Pasca Kasus Korupsi Mustafa.....	126

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian.....	43
Gambar 2. Proses Pengumpulan Data.....	50
Gambar 3. Kerangka Analisis.....	117
Gambar 4. Peta Pragmatisme Partai NasDem, PKS dan Hanura.....	120
Gambar 5. Hierarki Kebutuhan Menurut Maslow.....	121
Gambar 6. Kerangka Konsep Koalisi Pragmatis NasDem, PKS dan Hanura.....	130

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) merupakan perjalanan politik yang panjang dan diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit politik serta kehendak publik, kepentingan pusat dan daerah, atau bahkan antara kepentingan nasional dan internasional (Suharizal dalam Susilawan dkk dalam *Jurnal Tinjauan Yuridis terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 2015).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) langsung sebagai bentuk amanat normatif atas pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dan partisipatif, telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Melalui Undang-undang di atas menjadi dasar pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang juga mulai diwarnai dengan keberadaan bendera partai politik yang berbeda-beda sebagai imbas dari adanya demokrasi.



Demokrasi modern adalah demokrasi perwakilan. Partai-partai politik memainkan peranan penting dalam proses perwakilan. Keberadaan partai politik dalam era demokrasi modern menandakan bahwa partai-partai politik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem politik, baik yang otoriter atau yang demokratis sekalipun.

Meskipun fungsi partai politik tidak selalu konstan dan cenderung mengalami transformasi, tetapi dalam fenomena politik yaitu pemilihan umum, partai politik tetap menjalankan beberapa dari keseluruhan fungsinya seperti;

1. Aktif mencari, meneliti, dan mendesain kandidat yang akan bersaing dalam pemilu (Hazan dan Gideon, 2010: 168);
2. Pelatihan elit (Pamungkas, 2011:17);
3. Mengartikulasikan kepentingan politik. (Dalton dan Wattenberg, 2005:5).

Syarat bagi partai politik untuk mendaftarkan calon dalam pemilihan umum telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah disebutkan:

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.”

Syarat pemenuhan jumlah suara sah partai politik dan jumlah kursi di parlemen sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 40 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak seluruhnya terpenuhi oleh partai-partai politik yang ada. Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) satu-satunya partai yang memenuhi salah satu syarat yang diajukan undang-undang. PDIP memiliki jumlah suara sah sebanyak 26.84% dan 17 kursi parlemen dari total keseluruhan 85 kursi, itu berarti PDIP telah memenuhi syarat jumlah suara sah sebanyak 25% dan kouta kursi legislatif sebanyak 20%. Berikut hasil perolehan suara sah dan jumlah kursi legislatif seluruh partai politik yang melebihi ambang batas pada pemilu legislatif Provinsi Lampung 2014:

**Tabel 1. Hasil Perolehan Suara 12 Partai Politik pada Pemilu Legislatif Provinsi Lampung 2014**

No	Nama Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara	Persentase Suara
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	328.832 suara	26.84%
2	Partai Golongan Karya (Golkar)	154.033 suara	12.57%
3	Partai Demokrat	146.922 suara	11.99%
4	Partai Amanat Nasional (PAN)	143.990 suara	11.75%
5	Partai Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindra)	125.547 suara	10.24%
6	Partai Nasdem	114.371 suara	9.33%
7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	112.581 suara	9.19%
8	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	68.421 suara	5.58%
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	30.016 suara	2.45%
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	27.247 suara	2.22%
	Total Suara Sah Partai Politik	1.224.987 suara	100%

Sumber: KPU Provinsi Lampung 2014

**Tabel 2. Jumlah Kursi Partai Politik Dalam Parlemen (DPRD Provinsi Lampung) tahun 2014-2019**

No	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi Parlemen	Persentase
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	17 kursi	20%
2	Partai Golongan Karya (Golkar)	10 kursi	11.76%
3	Partai Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindra)	10 kursi	11.76%
4	Partai Demokrat	11 kursi	12.95%
5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	7 kursi	8.24%
6	Partai Amanat Nasional (PAN)	8 kursi	9.41%
7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	8 kursi	9.41%
8	Partai Nasdem	8 kursi	9.41%
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4 kursi	4.70%
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2 kursi	2.36%
Jumlah		85 kursi	100%

Sumber: KPU Provinsi Lampung 2014

Tidak adanya partai politik yang memenuhi syarat untuk mengajukan calon gubernur usungan partainya selain PDIP menyebabkan terjadinya koalisi partai politik. Koalisi partai politik sebagai hal umum disetiap pemelukada. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam melakukan koalisi partai politik oleh masing-masing partai berbeda-beda yang juga nantinya menghasilkan motif koalisi partai politik yang berbeda pula.

Pada tahun 2018 akan diadakan pemilihan umum untuk memilih Gubernur Lampung periode 2019-2024, hal tersebut dikarenakan masa bakti M.Ridho Ficardo selaku Gubernur Lampung terpilih periode 2014-2019 akan segera berakhir. Beberapa calon Gubernur Lampung sudah mulai mendeklarasikan pencalonannya. Pada penelitian ini penulis memilih Mustafa sebagai calon

Gubernur Lampung usungan Partai NasDem dan partai-partai lain yang berkoalisi dengannya seperti Partai Keadilan Sejahteraan (PKS) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Mustafa yang saat ini menjabat sebagai Bupati Lampung Tengah sekaligus ketua Umum Partai NasDem DPW Lampung resmi diusung oleh Partai NasDem pada 30 April 2017 lalu di Lampung Timur, deklarasi dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) dari Partai NasDem untuk mengusung Mustafa di pilgub Lampung 2018. Selanjutnya PKS dan Partai Hanura secara resmi mengusung Mustafa maju di pilgub Lampung 2018 sekaligus berkoalisi dengan Partai NasDem tertuang dalam SK DPP nomor 22/DPP-PKS/14/2017 dari PKS dan SK No SKEP/II/007/DPP-HANURA/IX/2017 dari Partai Hanura (ruangmustafa.com diakses pada 30 Oktober 2017 pukul 20:53 WIB).

Terjadinya koalisi ini menyebabkan Mustafa sebagai kader unggulan Partai NasDem mampu memenuhi syarat untuk maju sebagai calon Gubernur Lampung periode selanjutnya. Koalisi Partai NasDem, PKS dan Partai Hanura menghasilkan akumulasi suara sah ketiganya sebanyak 20.74% dan akumulasi kursi legislatif ketiga partai tersebut adalah 18 kursi. Dengan begitu koalisi ketiga partai ini telah memenuhi salah satu syarat yang diajukan dalam Pasal 40 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu memenuhui jumlah kursi legislatif sebanyak 20%.

Setelah melalui proses yang cukup panjang dari mulai deklarasi pencalonan Mustafa sebagai cagub Lampung periode mendatang, musyawarah antar partai yang akan berkoalisi mendukung Mustafa maju dalam pilgub Lampung 2018, terakhir, merebak desas-desus tentang nama-nama calon wakil gubernur pilihan Mustafa yang satu diantaranya akan dipilih Mustafa mendampinginya maju dalam pilgub Lampung 2018 ([lampungpro.com](http://lampungpro.com) diakses pada 20 Oktober 2017 pukul 13:46 WIB).

Akhirnya, pada awal Januari 2018 Mustafa secara resmi mengumumkan Ahmad Jazuli sebagai cawagub yang akan mendampinginya. Tepat pada 8 Januari 2018, dengan menunggangi gajah, Mustafa-Jazuli resmi menjadi cagub cawagub pertama yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) diiringi dengan massa pendukungnya. Mustafa-Jazuli menunggangi sebuah gajah dan di belakangnya ada ketua PKS dan ketua Partai Hanura menunggangi gajah yang lain disertai iringan shalawat ([liputan6.com](http://liputan6.com) diakses pada 9 Januari 2018 pukul 15:41 WIB).

Beberapa kabupaten di Provinsi Lampung khususnya, sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2017 telah terjadi pemilukada serentak yang melibatkan beberapa partai politik yang melakukan koalisi. Penulis meletakkan fokus utama terhadap rekan koalisi Partai NasDem disetiap pemilukada yang cenderung berubah dan berbeda. Penulis memilih Partai NasDem sebagai fokus utama sebab Partai NasDem yang dalam kesempatan kali ini menjadi 'kepala' dalam aliansi koalisi pendukung Mustafa, sebab calon Gubernur Lampung yang akan maju dalam pilgub tersebut merupakan kader dari Partai NasDem itu sendiri.

Partai NasDem beberapa kali melakukan koalisi dengan partai berideologi sejenis namun beberapa kali juga Partai NasDem berkoalisi dengan partai dengan ideologi yang berbeda, hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan bahwa apakah motif sebuah partai politik berkoalisi? Sebab perbedaan rekan koalisi yang cenderung dinamis yang dialami partai-partai politik tentunya memiliki motif koalisi yang berbeda pula. Pemetaan koalisi partai politik selama pemilu serentak di beberapa daerah di Provinsi Lampung sejak tahun 2015 hingga tahun 2017 penulis gambarkan seperti yang tertera pada tabel-tabel di bawah ini:



Nama Kabupaten/Kota dan Nama Paslon	Nama Partai Politik dan Independen										
	PDIP	Golkar	PD	PAN	Gerindra	NasDem	PKS	PKB	PPP	Hanura	Independen
<b>Kabupaten Pesawaran</b>											
1. Aries Sandi dan Muhammad Yunus											
2. Okta Rijaya dan Salamu Solikhin											
3. Fadhil Hakim dan Zainal Abidin											
4. Dendi Ramadhona dan Eriawan											
<b>Kabupaten Lampung Tengah</b>											
1. Samidjo dan Fatoni											
2. Mustafa dan Loekman											
3. Gunadi Ibrahim dan Imam Suhadi											
4. Mudiyanto Thoyib dan Musa Ahmad											

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015



**Tabel 4. Tabel Silang Pemetaan Koalisi Partai Politik pada Pilkada Serentak Beberapa Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2017**

Nama Kabupaten/Kota dan Nama Paslon	Nama Partai Politik dan Independen										
	PDIP	Golkar	PD	PAN	Gerindra	NasDem	PKS	PKB	PPP	Hanura	Independen
<b>Kabupaten Pringsewu</b>											
1. Adrian Saputra dan Dewi Arimbi											
2. Sujadi dan Fauzi											
3. Siti Rahma dan Edi Agus Yanto											
<b>Kota Lampung Barat</b>											
1. Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin											
2. Edy Irawan Arief dan Ulul Azmi Soltiansa											
<b>Kabupaten Mesuji</b>											
1. Febriana Lesisie dan Adam Ishak											
2. Khammani dan Saply											
<b>Kabupaten Tulang Bawang</b>											
1. Syarnubi dan Sholihah											
2. Hanan A Razak dan Heri Wardoyo											
3. Winarti dan Hendriwansyah											

Sumber: KPU Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang tahun 2017

Berdasarkan tabel silang yang telah penulis petakan di atas, terlihat bahwa masing-masing partai politik berkoalisi dengan partai politik yang berbeda. Partai NasDem misalnya, pada pemilukada serentak di Provinsi Lampung tahun 2015 berkoalisi dengan beberapa partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak empat kali, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak tiga kali, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak dua kali, Partai Demokrat (PD) dan Partai Golkar sebanyak satu kali. Mayoritas rekan koalisi dari Partai NasDem pada pemilukada tahun 2015 lalu adalah PDIP sebanyak empat kali dan dilanjutkan dengan Partai Gerindra, PKB dan PAN sebanyak tiga kali.

Sementara itu untuk pemilukada serentak di Provinsi Lampung tahun 2017 Partai NasDem berkoalisi dengan beberapa partai yaitu Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sosial (PKS) sebanyak tiga kali, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak dua kali, Partai Hanura sebanyak satu kali. Mayoritas rekan koalisi dari Partai NasDem pada pemilukada tahun 2017 lalu adalah PKS dan PD sebanyak tiga kali dan dilanjutkan dengan Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB dan PAN dan PPP sebanyak tiga kali.

Pada pilgub Lampung 2018 Partai NasDem berkoalisi dengan PKS dan Partai Hanura, PKS sendiri merupakan partai yang menjadi mayoritas rekan koalisi Partai NasDem pada pemilukada serentak 2017 lalu yaitu sebanyak tiga kali tepatnya berkoalisi di pemilukada Kabupaten Lampung Barat, Mesuji dan

Tulang Bawang. Sedangkan Partai Hanura sepanjang 2015 hingga 2017 baru berkoalisi sebanyak satu kali dengan Partai NasDem yaitu pada pemilukada di Kabupaten Tulang Bawang mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati pertahana Hanan A Razak dan Heri Wardoyo.

Semakin banyak partai politik hal ini seakan menutup kemungkinan untuk salah satu partai memenangkan pemilu secara mutlak. Sehingga dengan kondisi seperti ini, kemungkinan partai politik melakukan kerjasama atau koalisi dalam pemenangan calon eksekutif baik pusat maupun daerah. Secara teoritis dalam melakukan koalisi partai politik akan melihat siapa yang akan diajak berkoalisi, tentunya partai politik yang sepaham. Karena dengan begitu maka akan lebih mudah untuk bekerjasama ketika banyak kesamaan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi tersebut (Strom dalam *Jurnal A Behavioral Theory of Competitive Political Parties, American Journal Of Political Science*, Vol 34, 1990).

Fenomena sekarang yang terjadi di Indonesia, perbedaan partai politik sudah semakin kabur. Koalisi partai-partai politik yang dilakukan sifatnya jangka pendek, yaitu tentang bagaimana mendapatkan kekuasaan. Seharusnya arah koalisi partai politik dilandasi oleh ideologi partai yang kemudian menjadi identitas yang termanifestasi pada program partai tetapi yang terjadi adalah partai apapun dimungkinkan melakukan koalisi selama hal itu menguntungkan, koalisi seperti ini adalah koalisi yang cenderung pragmatis (Prasetya dalam *Jurnal Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik*, Vol 1 No 1, 2011).

Apa yang terjadi adalah bukan persoalan jika kemudian bekerjasama dengan partai yang berbeda ideologi, yang terpenting adalah hal itu mempermudah untuk mendapatkan kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari koalisi partai politik, yang tidak memiliki keseragaman koalisi baik ditingkat pusat maupun di daerah. Menghindari koalisi yang sifatnya pragmatis dan kembali ke koalisi yang sifatnya ideologis seperti yang seharusnya, maka partai politik harus lebih berorientasi terhadap kesamaan ideologi guna kerjasama jangka panjang dan bukan pencapaian kekuasaan yang sifatnya jangka pendek dan untuk arah kerjasama kedepannya menjadi lebih sulit dikarenakan perbedaan ideologi yang berimbas juga terhadap perbedaan sudut pandang, visi, misi dan persepsi.

Mengamati kegiatan politik dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada perspektif atau kerangka acuan yang dipakai. Cara kita mengamati kegiatan politik itu akan mempengaruhi apa yang kita lihat. Pendekatan (*approach*) sebagai kriteria untuk menyeleksi masalah dan data yang relevan (Dyke, 1960:114). Dengan kata lain, istilah pendekatan mencakup standar atau tolak ukur yang dipakai untuk memilih masalah, menentukan data mana yang akan diteliti dan data mana yang akan dikesampingkan.

Sebagai bahan referensi atas penelitian ini, maka penulis mencantumkan tiga penelitian terdahulu berupa tugas akhir karangan alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berhubungan dengan koalisi partai politik. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini:

**Tabel 5. Penelitian Terdahulu dan Sejenis**

No	Nama Peneliti	Tahun	Jenis	Judul Penelitian
1	Ananda Putri Sujatmiko	2016	Skripsi	Kartelisasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahu 2015
2	Darmawan Purba	2012	Tesis	Pola Koalisi Partai Berbasis Islam pada Kasus Proses Rekrutmen Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2010–2015
3	Bilawal Zandra Faris	2010	Skripsi	Pengaruh Partai Politik Terhadap Ketidakpastian Koalisi Partai Politik

Sumber: Diolah peneliti (2017)

Berdasarkan data penelitian terdahulu yang sejenis maka perbedaan tiga penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

- a. Penelitian pertama, penelitian Ananda Putri Sujatmiko melihat dari segi koalisi partai politik yang berujung kartelisasi menggunakan *rational choice theory* dengan pendekatan *collective-action*, konsep partai kartel yang diadaptasi dari Kartz dan Mair sedangkan peneliti pada penelitian ini meneliti motif koalisi partai politik yang menggunakan pemikiran Wolfgang Muller dan Kaare Strom sebagai *grand theory* yang dilanjutkan dengan pemikiran Abraham De Swaan tentang koalisi ideologis serta Kartz dan Mair tentang koalisi pragmatis.

- b. Penelitian kedua, Darmawan Purba dalam penelitiannya berfokus pada proses koalisi, motif dan pertimbangan koalisi, kriteria dan mekanisme rekrutmen dan hambatan koalisi pada partai berbasis Islam. Teori yang digunakan adalah teori pola koalisi partai politik yang hasilnya koalisi partai politik yang sifatnya pragmatis dan transaksional. Sedangkan peneliti dalam penelitian ini hanya berfokus pada motif koalisi partai politik secara umum dan bukan tertuju pada partai politik dengan ideologi tertentu.
- c. Penelitian ketiga, Bilawan Zandra Faris dalam penelitiannya berfokus pada penialain terhadap partai politik sebelum melakukan koalisi. Penilaian dilakukan dengan model yang merupakan cabang dari *Cooperative Game Theory* yaitu *Shapley Value*, *Shapley Value* dengan koalisi subjektif tertimbang, dan *Core*. Sedangkan peneliti dalam penelitian ini menganalisis alasan partai politik memilih partai politik tertentu sebagai rekan koalisi dari segi eksternal dan internal yang nantinya akan menghasilkan dua kemungkinan antara koalisi ideologis atau koalisi pragmatis.

Berdasarkan apa yang telah diulas mengenai fenomena-fenomena menjelang pemilihan umum Gubernur Lampung 2018 maka penulis dalam penelitian ini mengangkat judul “Analisis Motif Koalisi Partai Politik Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Gubernur Lampung Tahun 2018 (Studi pada koalisi Partai NasDem, PKS dan Partai Hanura Provinsi Lampung)”. Penelitian ini berkaitan dengan dua mata kuliah yaitu Partai Politik dan Pemilihan Umum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Apakah motif koalisi partai politik (NasDem, PKS dan Hanura) dalam menghadapi pilgub Lampung 2018?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif koalisi partai politik (NasDem, PKS dan Hanura) dalam menghadapi pilgub Lampung 2018.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai referensi tambahan khasanah ilmu politik dalam hal studi motif koalisi partai politik dalam menghadapi pilgub khususnya bagi koalisi antara Partai NasDem, PKS dan Hanura dalam menghadapi pilgub Lampung 2018. Koalisi partai politik dalam suatu pemilihan umum ataupun pilkada seperti pilgub misalnya memiliki dua motif yang berbeda antara lain yaitu koalisi yang sifatnya ideologis dengan mengedepankan persamaan ideologi dan juga koalisi yang sifatnya pragmatis dengan mengedepankan persamaan tujuan antarpolisi.

b. Bagi peneliti sebagai tambahan pengetahuan tentang bagaimana menganalisis secara mendalam motif koalisi partai politik dalam menghadapi pilgub. Sejalan dengan hadirnya penelitian ini, peneliti mampu memahami dinamika koalisi partai politik disetiap pemilihan umum khususnya pilgub. Rekan koalisi tiap-tiap partai politik cenderung berbeda di tiap momen pemilihan umum yang berbeda. Hal tersebut didasarkan pada ideologi ataupun kepentingan sebuah partai politik terhadap partai politik lain dalam kondisi tertentu baik dalam memenuhi syarat pemilihan umum ataupun guna memenangkan pemilihan umum.

## 2. Manfaat Praktis

Meskipun pembentukan koalisi seringkali dibangun sekedar memenuhi prasyarat administratif pencalonan, pembahasan mengenai motif koalisi penting untuk mengetahui sejauh mana pelebagaan masing-masing partai politik di tingkat lokal yang berimbas pada pola mereka berkoalisi untuk mengusung pasangan calon dalam sebuah pilkada. Pembahasan tentang pembentukan koalisi di tingkat lokal juga penting untuk memahami tentang pentingnya partai politik dalam pembentukan kualitas calon kepala daerah.

Berbeda dari penelitian lain yang pada umumnya dalam hal pilkada lebih memfokuskan pada popularitas dan kharisma calon kepala daerah, strategi pemenangan calon kepala daerah, politik uang dan kekayaan serta peran media dalam pilkada. Penelitian ini lebih berfokus pada perilaku partai politik bagaimana koalisi dari partai politik sangat berpengaruh menjadi dukungan kuat bagi calon kepala daerah yang diusung koalisi tersebut.



## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan tentang Partai Politik**

Bagi Machiavelli, politik adalah seni dari kemungkinan. Manipulasi, keahlian dan kelihaihan dalam penggunaan kekuasaan merupakan syarat-syarat untuk berkuasa (Apter, 1996:77). Kekuasaan yang merupakan sasaran utama dalam politik juga dijadikan orientasi daripada partai politik. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik yang biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya (Budiardjo, 2008:403-404).

Bertumpu pada kerangka fungsionalis-struktural yang sudah lama ada, memandang partai politik sebagai lembaga-lembaga yang memainkan dua peranan penting di dalam berfungsinya rezim demokratis; Pertama, partai-partai menyeleksi dan merangkum berbagai isu serta menyajikannya kepada pemilih dalam sebuah paket yang kurang-lebih runtut, sebagaimana terungkap lewat manifesto/platform partai. Kedua, partai-partai yang menang menempatkan dirinya sebagai tulang punggung bagi pemerintahan yang

terpilih, dengan pengharapan umum bahwa janji-janji kampanye mereka akan diubah menjadi kebijakan publik (Klingemann dkk, 2000:xv).

Sementara kekuasaan oleh para sarjana-sarjana dipakai dalam arti yang bermacam-macam seperti; *authority* (wewenang), *control* (kontrol), *capacity* (kapasitas), *relationship* (hubungan), *process* (proses), *domination* (dominasi), *influence* (pengaruh), *things* (benda) (Gie, 1978: 19-20). Kehadiran partai politik yang paling terasa adalah disaat pemilihan umum, dimana partai politik akan mengirimkan wakil-wakil pilihannya yang telah lolos dari pola rekrutmen tertentu untuk menjadi bakal calon kepala daerah atau berkoalisi.

#### 1. Pengertian Partai Politik

Definisi klasik mengenai partai politik diajukan oleh Edmund Burke tahun 1839 dalam tulisannya "*Thoughts on the cause of the present discontents*". Burke menyatakan bahwa "*party is a body of men united, for promoting by their joint endeavors the national interest, upon some particular principle upon which they are all agreed*" (partai politik adalah lembaga yang terdiri atas orang-orang yang bersatu, untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama, berdasarkan prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setuju). (Burke,1939:110).

Definisi Burke ini tampak masih "*abstrak*" oleh sebab tidak semua partai secara empiris memperjuangkan kepentingan nasional. Misalnya dalam tulisan Robert Michels tentang *The Iron Law of Oligarchy* (Hukum Besi Oligarki). Robert Michels menyatakan bahwa partai politik, sebagai sebuah

entitas politik, sebagai sebuah mekanisme, tidak secara otomatis mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan para anggotanya juga kelas sosial yang diwakili. Sehingga partai politik dalam pandangan Michels memungkinkan terjadinya koalisi besar dikarenakan adanya kepentingan yang relevan. (Michels, 1968:28).

Definisi lain mengenai partai politik diajukan oleh Joseph Schumpeter dalam bukunya yang berjudul *Capitalism, Socialism dan Democracy*. Menurut Schumpeter, partai politik adalah kelompok yang anggotanya bertindak terutama dalam hal perjuangan mencapai kekuasaan. Partai dan para politisinya merupakan contoh sederhana bagi tanggapan atas ketidakmampuan massa pemilih untuk bertindak selain dari ketidakrapian organisasinya, dan mereka secara nyata berusaha mengatur kompetisi politik layaknya praktik yang sama yang dilakukan oleh asosiasi perdagangan. (Schumpeter, 2003:283).

Joseph Lapalombara dan Jeffrey Anderson pun memberikan definisi tentang partai politik adalah “*any political group, in possession of an official label and of a formal organization that links centre and locality, that presents at elections, and is capable of placing through elections, candidates for public office*. (setiap kelompok politik, yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas yang hadir saat pemilihan umum, memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilu (baik bebas maupun tidak bebas)

(Lamaplombara dan Anderson dalam Omotola dalam *Jurnal Political Parties and the Quest for Political Stability in Nigeria*, 2010).

Carl J Friedrich juga mendefinisikan partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil. (Friedrich dalam Loso dkk dalam *Jurnal Analisis Kegagalan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Memperebutkan Kursi Di Dprd Kabupaten Batang*, 2013).

## 2. Fungsi Partai Politik

Banyak kalangan berusaha melekatkan sejumlah fungsi pada partai politik. Celakanya, fungsi itu di daftar sedemikian rupa tanpa berusaha memverifikasi apakah fungsi itu secara empirik dilakukan atau tidak dilakukan oleh partai politik. Cara itu adalah sebuah kekeliruan yang fatal. Selama ini, berbagai fungsi yang dilekatkan pada partai politik dilekatkan begitu saja lewat mekanisme yang bersifat teoritis dan logis padahal, partai politik itu (apakah fungsi, posisi, dan bobotnya dalam sistem politik) tidak dirancang oleh suatu teori tapi ditentukan oleh kejadian-kejadian yang ada. (Sartori, 1976:18).

Ramlan Surbakti merumuskan tujuh fungsi utama partai politik (Surbakti, 1992:149-154) sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Politik  
Proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat, melalui proses sosialisasi politik inilah masyarakat mengetahui arti pentingnya politik beserta instrumen-instrumennya.
- b. Partisipasi Politik  
Partai politik dengan fungsi komunikasi dan sosialisasi politiknya akan membawa kepada pencerahan yang rasional kepada masyarakat untuk kegiatan politik.
- c. Pemandu Kepentingan  
Partai politik dalam hal ini melakukan kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
- d. Komunikasi Politik  
Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintahan kepada masyarakat dan dari masyarakat ke pemerintah.
- e. Pengendalian Konflik  
Berbicara konflik ini kemudian akan berkaitan dengan kepentingan, konflik ini muncul karena ada kepentingan-kepentingan yang berbeda saling bertemu.
- f. Kontrol Politik  
Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintahan.

David McKay (dalam Jurdi, 2014:141) juga menjelaskan fungsi lain dari partai politik sebagai berikut:

- a. Agregasi Kepentingan  
Fungsi ini adalah posisi partai sebagai alat untuk mempromosikan serta mempertahankan kepentingan dari kelompok-kelompok sosial yang ada.
- b. Memperdamaikan Kelompok dalam Masyarakat  
Fungsi ini adalah fungsi partai politik untuk membantu memperdamaikan aneka kepentingan yang saling bersaing dan berkonflik dari masyarakat, dengan menyediakan platform penyelesaian yang seragam dan disepakati bersama.
- c. *Staffing Government*  
Fungsi ini adalah posisi partai politik untuk mengajukan orang-orang yang akan menjadi pejabat publik, baik baru maupun menggantikan yang lama.

- d. Mengkoordinasi Lembaga-lembaga Pemerintah  
Fungsi ini adalah posisi partai politik mengkoordinasi aneka lembaga pemerintah yang saling berbeda untuk tetap memperhatikan kepentingan politik publik.
- e. Memperomosisikan Stabilitas Politik  
Fungsi ini adalah fungsi partai politik untuk mempromosikan stabilitas politik, meminimalisir konflik dengan menyaring informasi-informasi yang memunculkan potensi konflik.

Penulis lain misalnya Janos Simon membagi fungsi partai politik menjadi enam dalam (Simon, 2003:17-27) yaitu:

- a. Fungsi Sosialisasi Politik  
Fungsi partai politik sebagai agen guna mengisi norma-norma dan nilai-nilai yang ada pada diri individu. Peran ini semakin besar di negara-negara dengan sistem kepartaian multipartai.
- b. Fungsi Mobilisasi  
Fungsi partai politik untuk membawa warganegara ke dalam kehidupan publik, mengurangi ketegangan sosial yang ditampakkan oleh kelompok-kelompok yang termobilisasi.
- c. Fungsi Partisipasi  
Fungsi partai politik untuk membawa warganegara agar aktif dalam kegiatan politik.
- d. Fungsi Legitimasi  
Fungsi partai politik yang mengacu pada kebijakan politik mendukung dan mempercayai kebijakan pemerintah maupun eksistensi sistem politik.
- e. Fungsi Representasi  
Fungsi partai politik yang ikut pemilihan umum dan memenangkan sejumlah suara, akan menempatkan wakilnya di dalam parlemen.
- f. Fungsi Aktivitas Dalam Sistem Politik  
Fungsi partai politik menjabarkan programnya dan menyiapkan anggota-anggotanya untuk menjalankan program tersebut.

Sementara itu dalam pandangan Matthias Caton dalam negara demokrasi ada berbagai fungsi partai politik. Pertama adalah fungsi artikulasi kepentingan, yaitu mengembangkan program-program dan kebijakan pemerintah yang konsisten. Kedua, fungsi agregasi kepentingan, memungut tuntutan masyarakat dan membungkusnya. Ketiga, rekrutmen, yaitu

menyeleksi dan melatih orang untuk posisi-posisi di eksekutif dan legislatif.

Keempat. Mengawasi dan mengontrol pemerintah (Caton, 2007:7).

**Tabel 6. Fungsi Partai Dalam Negara Demokrasi**

	<b>Artikulasi</b>	<b>Agregasi</b>	<b>Rekrutmen</b>
Pemerintah	Melaksanakan kebijakan	Melanggengkan dukungan kepada pemerintah	Mengisi posisi-posisi pemerintahan
Oposisi	Mengembangkan alternatif	Mendapatkan dukungan untuk perubahan	Membangun kelompok orang yang kompeten

Sumber: Caton (2007:7)

### 3. Tipologi Partai Politik

Tipologi menurut (Katz dan Crotty, 2006:262) yang membagi partai politik ke dalam lima bagian yaitu;

- a. **Kaukus Elit atau Partai Kader (1860-1920)**  
Awal mula partai ini berasal dari parlemen. Pemilihnya amat terbatas dari kelas tertentu yaitu kelas atas dengan kontak pribadi dan rekrutmen elitnya hanya berasal dari kelas atas, rekrutmen sendiri dengan inisiatif privat.
- b. **Partai Massa (1980-1950)**  
Partai ini berasal dari luar parlemen. Muncul dari kelompok sosial khusus seperti kelompok etnis ataupun agama. Rekrutmen elit berasal dari internal didasarkan kelas atau agama dengan komitmen berbasis ideologi dan organisasi melalui sistem pendidikan di dalam partai.
- c. **Catch-all, Partai *Electoralis* (1950 - sekarang)**  
Asal usulnya yaitu dari massa partai, pertalian atau penyatuan antara massa dengan kelompok kepentingan. Pemilih dan dukungan sosial muncul dari kelas menengah melampaui kelompok pendukung inti. Rekrutmen elit sistemnya eksternal dengan beraneka ragam kelompok kepentingan.
- d. **Partai Kartel (1950 - sekarang)**  
Berasal dari penggabungan partai parlemen (dan kelompok kepentingan). Kemunculan pemilih dan dukungan sosial bersifat "*regular cliente*" yang menyediakan pertukaran dukungan untuk kebijakan yang menguntungkan. Rekrutmen elit terutama dari dalam struktur negara (birokrasi).

- e. Partai Firma Bisnis (1990 – sekarang)  
 Asal usul partai ini berasal dari inisiatif privat dari wirausahawan politisi. Kemunculan pemilih dan dukungan sosial berasal dari “pasar pemilih” dengan tingkat perpindahan tinggi, pemilih adalah konsumen. Rekrutmen elit sendiri dan inisiatif privat. Partai jenis ini bersifat tertutup dan berbeda dengan jenis partai politik pada umumnya.

Ahli selanjutnya yang juga melakukan klasifikasi terhadap partai politik adalah Kartz dalam (Jurdi, 2014:150). Kartz membagi tipe partai politik menjadi 4 tipe, yaitu:

- a. Partai Elit  
 Partai jenis ini berbasis lokal, dengan sejumlah elit inti yang menjadi basis kekuatan partai. Dukungan bagi partai elit ini bersumber pada hubungan *client* (anak buah) dari elit-elit yang duduk di partai ini.
- b. Partai Massa  
 Partai jenis ini berbasiskan individu-individu yang jumlahnya besar, tetapi kerap tersingkirkan dari kebijakan negara. Biasanya, partai massa berbasiskan kelas lokal tertentu, seperti “orang kecil”, tetapi juga berbasis agama.
- c. Partai *Catch-All*  
 Partai jenis ini dipermukaan hampir serupa dengan Partai Massa. Namun, berbeda dengan partai massa yang mendasarkan diri pada kelas sosial tertentu, Partai *Catch-All* mulai berfikir bahwa dirinya mewakili kepentingan bangsa secara keseluruhan. Partai jenis ini berorientasi pada pemenangan pemilu sehingga fleksibel untuk berganti-ganti isu di setiap kampanye.
- d. Partai Kartel  
 Partai jenis ini muncul akibat berkurangnya jumlah pemilih atau anggota partai. Dari sisi partai Kartel, ideologi, janji pemilu, basis pemilih hampir sudah tidak memiliki arti lagi (Kartz dan Mair dalam Jurnal *The Cartel Party Thesis: A Restatement*, 2009).
- e. Partai Integratif  
 Partai jenis ini berasal dari kelompok sosial tertentu yang mencoba untuk melakukan mobilisasi politik dan kegiatan partai. Mereka membawakan kepentingan spesifik suatu kelompok (Simon, 2005:11).



Selanjutnya, (Duverger, 1984:22-25) membagi tipologi partai berdasarkan kriteria jumlah partai yaitu:

a. Sistem Multipartai

Jumlah partai, ukuran besarnya, strukturnya dan organisasinya harus diperhitungkan secara stimulan. Dari segi jumlah, tipe-tipe sistem banyak partai secara teoritis tidak terbatas, tetapi secara praktis situasinya jauh lebih sederhana.

b. Sistem Dua Partai

Rupanya, tidak banyak terdapat sistem dua partai ini, dilihat dari segi kemungkinan matematik. Walaupun jumlah partai yang demikian tidaklah menjadi faktor disini, eksistensi suatu kelompok politik yang sangat kecil kadang-kadang juga dapat mempengaruhi keseluruhan sistem.

Pada prinsipnya, ada tiga macam sistem kepartaian. Sebagaimana juga sistem kepartaian dalam lingkup klasifikasi Duverger yakni; sistem satu partai, sistem dua partai dan sistem banyak partai. Dalam hal ini (Sukarna dalam Jurdi, 2014:154-159) mengajukan sejumlah kelebihan dan kelemahan dari tiga sistem ini yaitu:

a. Sistem Satu Partai

Menurut Sukarna sistem ini memiliki kelebihan yakni pimpinan partai politik yang mendapat dukungan secara meluas daripada pimpinan lain dalam partai itu akan selalu berada dalam kedudukan kekuasaan, baik dalam partai maupun negara. Kelemahannya antara lain adalah hak-hak asasi manusia yaitu hak kemerdekaan, baik kemerdekaan di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya sangat dibatasi terutama dalam kemerdekaan berpolitik, mengingat masyarakat tidak lagi memiliki kebebasan untuk memilih, kecuali memilih yang satu-satunya itu.

b. Sistem Dua Partai

Kelebihannya adalah dalam sistem dua partai memiliki kaitan erat dengan pemilu sistem distrik, selalu menghasilkan partai mayoritas dalam pemilu, yaitu sebagai sarat pemerintahan atau kabinet yang mendapat dukungan dari parlemen.

c. Sistem Banyak Partai

Kelemahan sistem ini menurut Sukarna adalah lahir karena banyak ideologi yang dianut, ideologi itu sendiri berarti suatu hasil pemikiran manusia tentang politik, sosial, ekonomi dan budaya berdasarkan suatu ajaran hingga rentan konflik.

#### 4. Pembagian Arena Kompetisi Partai

Robert Dahl, telah mengidentifikasi *multiple arenas* dari kompetisi politik yakni: arena pemilu, arena legislatif, arena birokrasi, arena pemerintah daerah, dan banyak lagi. Masing-masing diantaranya bisa jadi arena yang paling menentukan sikap politik partai, terutama dalam mencapai tujuannya. (Dahl dalam Giorgi dalam *Jurnal Parliamentary Opposition in Western European Democracies Today*, 2007).

Sebuah studi kontemporer di tahun 1999 menjelaskan dilema yang berkelanjutan yang dihadapi partai politik dalam membuat keputusan berkaitan dengan konflik tujuan. Demi mempertahankan dukungan dalam pemilu, partai mungkin mengorbankan tujuannya yang lain dalam memajukan pilihan kebijakan ataupun meraih jabatan. Dilema kemudian tumbuh ketika partai membutuhkan koalisi untuk membentuk sebuah pemerintahan, namun partner yang potensial disertai dengan haluan ideologi yang sama tidak memiliki suara yang cukup untuk duduk di kursi pemerintahan (Muller dan Strom, 1999: 3).

Dilema dapat juga terjadi ketika partai politik dihadapkan pada pilihan antara berpegang teguh dengan komitmen kebijakan dan memperoleh jabatan. Pilihan pertama pasti akan mengalahkan pilihan kedua, dan begitupun sebaliknya. Maka demikian, dalam dilema tersebut sebuah partai mungkin untuk merubah perilakunya demi mencapai tujuannya.

## 5. Pragmatisme Partai Politik

Secara filsafatis, pragmatisme dapat diterjemahkan sebagai ajaran yang menekankan bahwa sebuah bentuk pemikiran mengikuti tindakan. Kriteria kebenarannya yakni 'faedah' atau 'manfaat'. Artinya, suatu teori maupun hipotesis dianggap oleh pragmatisme benar apabila bisa diaplikasikan dan membawa manfaat (Brunning dan Forster, 1997: 140-141).

Peirce mengatakan bahwa terdapat dua poin yang menjadi pertimbangan kaum pragmatis dalam bertindak. Pertama adalah berupa ide atau keyakinan yang mendasari keputusan yang harus diambil untuk melakukan tindakan tertentu. Sedangkan yang kedua yakni tujuan dari tindakan itu sendiri (Pierce dalam Brunning dan Forster, 1997: 147)

Manusia memiliki ide atau keyakinan yang ingin direalisasikan dan memiliki tujuan tertentu, yang mana sekaligus merupakan konsekuensi praktis atas sebuah tindakan. Sehingga, bagi Pierce, apa yang dikatakan sebagai prinsip pragmatis dalam arti yang sebenarnya yakni suatu metode untuk menentukan konsekuensi praktis dari suatu ide atau tindakan (Pierce dalam Brunning dan Forster, 1997: 143).

Namun, pada perkembangannya, pragmatisme berkembang tidak hanya pada konteks 'mendamaikan' filosofis dan metafisik, namun juga telah masuk ke dalam tataran politik terutama dalam tubuh partai politik. Jika pada pragmatisme menyatakan bahwa segala jenis ide atau gagasan akan

benar apabila memiliki manfaat secara praktis karena memiliki tujuan yang jelas, maka politik pun demikian.

## 6. Pembilahan Sosial dan Ideologi Partai Politik

Istilah ideologi pertama kali diperkenalkan oleh Destutt de Tracy yang mengartikan ideologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang eksistensi ide. Ideologi juga dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan tentang ide. Berbagai kamus, menjelaskan bahwa ide bermakna juga gagasan, cita-cita, rancangan yang tersusun dalam pikiran manusia, atau perasaan yang benar-benar menyelimuti pikiran. Artinya, ide senantiasa berkaitan dengan pemikiran dan penalaran manusia (Arifin, 2014: 113).

Setiap bangsa di dunia ini masing-masing memiliki nilai-nilai dasar dan pandangan hidup atau ideologi sendiri yang pada umumnya berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya, sesuai dengan latar belakang historis dan sosial kultural masing-masing negara dan bangsa. Pandangan hidup bangsa (*way of life of nation*) itu pada umumnya dilembagakan dalam konstitusi dan membentuk suatu sistem.

Ideologi merupakan hal wajib bagi partai politik, dengan ideologinya sebuah partai politik akan terlihat bentuknya. Bentuk disini adalah kemana arah partai politik ini akan memainkan fungsinya, apa yang akan disosialisasikan ke masyarakat, sikap dan orientasi politik seperti apa yang akan dibentuk, masyarakat seperti apayang menjadi basis perjuangan partai, dengan nilai-nilai seperti apa perjuangan itu akan dilakukan, bentuk

masyarakat seperti apa yang akan dibentuk dan lain sebagainya. dengan dasar ideologilah partai itu akan bergerak melalui program kebijakan partai yang kemudian akan menjadi program kerja nyata yang bisa dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat.

Bersama ideologinya masing-masing partai politik itu akan mempunyai identitas yang jelas, hal tersebutlah kemudian yang memudahkan partai politik tersebut dalam mendapatkan massa pendukung. Di sisi yang lain masyarakat pun akan lebih mudah untuk menentukan partai mana yang sesuai dengan keinginan yang memang memperjuangkan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. (Prasetya dalam *Jurnal Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik*, 2011).

a. Partai NasDem

Partai NasDem adalah sebuah partai politik di Indonesia berideologi Pancasila yang baru diresmikan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 26 Juli 2011 (AD/ART Partai NasDem Pasal 1). Partai ini didukung oleh Surya Paloh yang merupakan pendiri organisasi bernama sama yaitu Nasional Demokrat (inilah.com diakses pada 11 November 2017 pukul 19:15 WIIB).

Guna mendapatkan status resmi sebagai badan hukum, Partai NasDem didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia pada bulan Maret 2011. Kelahiran Partai NasDem tidak bisa dipisahkan lepas dari visi dan misi utama organisasi kemasyarakatan (ormas) Nasional Demokrat, yaitu menggalang Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia

(detikNews.com diakses pada 11 November 2017 pukul 19:20 WIB). Partai NasDem memakai konsep Restorasi Indonesia sebagai salah satu kegiatan andalannya.

b. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

PKS merupakan partai yang berdiri pada masa pasca Orde Baru, dideklarasikan pada April 2003 sebagai keberlanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang pada pemilu 1999 tidak mendapat dukungan signifikan dari pemilih. Partai ini didirikan oleh orang-orang dengan latar belakang aktivis keagamaan berbasis kampus, terutama sekali di kampus-kampus sekuler. Basis pendukung PKS adalah pembilahan sosial dengan karakteristik kelas menengah atas, kaum terdidik dan Islam (Pamungkas, 2011: 137).

PKS merupakan partai dengan basis ideologi Islam modernis dan dengan pengorganisasian partai yang solid. Pemikiran pemikiran Ikhwanul Muslimin sangat mewarnai partai. Dalam debat-debat regulasi partai ini banyak mengartikulasikan kepentingan-kepentingan politik Islam. Meskipun demikian, partai ini relatif inklusif dalam membangun kerjasama dengan partai lain seperti terlihat dalam koalisi pilkada dan program partai.

c. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Awal berdirinya partai ini tak lepas dari gagasan Jendral Tentara Nasional Indonesia (TNI) Wiranto beserta tokoh-tokoh nasional lain. Gagasan ini kemudian dibahas dalam sebuah pertemuan yang diadakan di

Jakarta pada tanggal 13-14 November 2006. Pertemuan ini dihasilkan 8 kesepakatan yang menjadi tonggak berdirinya partai. (profil.merdeka.com diakses pada 11 November 2017 pukul 15:25 WIB).

Partai Hanura mempunyai visi yang terbagi menjadi 2 bagian yakni Kemandirian Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat. Visi tersebut secara garis besar menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia terasa tidak mandiri lagi dengan banyaknya campur tangan pihak asing yang dapat merugikan kehidupan bangsa sehingga diharapkan seluruh rakyat Indonesia mampu bangkit kembali demi menciptakan sebuah bangsa yang mandiri.

## **B. Tinjauan tentang Koalisi Partai Politik**

Pembentukan koalisi menunjukkan peran elit dalam pecaturan politik menjadi sangat dominan dan merupakan elemen penting yang tidak dapat dipisahkan baik skala lokal maupun nasional (Winarsih dkk dalam *Jurnal Peran Partai Politik dan Kalkulasi Elit terhadap Karakteristik Koalisi*, 2015). Posisi elit atau aktor di daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, posisi elit sangat strategis dalam pengusungan kandidat maupun pembentukan koalisi, namun pertimbangan yang digunakan oleh elit dalam menentukan kebijakan yang diambil belum terlihat jelas.

Secara teoritis, koalisi partai hanya akan berjalan jika dibangun di atas landasan pemikiran yang realistis dan layak. Dasar pertimbangan ini menuntut kesediaan partai dan para pendukungnya untuk menyadari bahwa koalisi bukan

sekedar mencari teman dan semuanya selesai. Selektif dalam hal koalisi adalah hal yang penting.

### 1. Pengertian Koalisi Partai Politik

Koalisi adalah sebuah pengelompokan aktor-aktor politik pesaing untuk dibawa bersama baik melalui persepsi ancaman bersama atau pengakuan bahwa tujuan mereka tidak dapat dicapai dengan bekerja sama secara terpisah (Heywood, 2000:194); atau penggunaan sumber daya bersama untuk menentukan hasil dari sebuah situasi motif campuran yang melibatkan lebih dari dua unit.

Pada sistem multipartai saat kekuatan politik terdistribusi ke dalam banyak simpul partai, terutama sekali sistem pemerintahan parlementer, kebutuhan untuk membangun koalisi adalah kondisi yang tidak terhindarkan. Pada sistem parlementer, ketika tidak ada partai mayoritas maka pembentukan pemerintahan atau kabinet hanya dapat melalui koalisi diantara partai-partai yang ada. Meskipun demikian pada presidensialisme terjadinya koalisi partai juga bukan hal yang mustahil (Pamungkas, 2011:78).

Ada empat arena dalam koalisi partai yang dalam hal ini berada dalam lingkup yang berbeda menurut Heywood yaitu; koalisi elektoral, koalisi legislatif, koalisi pemerintahan dan koalisi besar atau pemerintahan nasional. Studi tentang koalisi ini dibutuhkan untuk mengerti keterikatan aktor-aktor politik dalam membangun suatu kolektivitas (Heywood, 2000:195).



## 2. Sumber Daya Koalisi Partai Politik

Studi paling klasik tentang koalisi menempatkan besaran kekuatan partai (*size of party power*) sebagai sumberdaya penentu terbentuknya koalisi partai oleh Theodore Calpow yang membuat simulasi kemungkinan koalisi dari tiga kekuatan (*triad*) yang berbeda. Kemungkinan koalisi dari *triad* dibangun atas sejumlah asumsi berikut:

- a. Anggota triad mungkin berbeda kekuatannya. Anggota yang lebih kuat dapat mengontrol anggota yang lebih lemah, dan akan berusaha melakukannya.
- b. Setiap anggota triad mencari kontrol anggota yang lain. Kontrol atas dua yang lain lebih disukai daripada mengontrol satu lainnya. Kontrol atas satu yang lain dipilih daripada tidak ada yang dikontrol.
- c. Kekuatan adalah bertambah. Kekuatan koalisi adalah setara dengan jumlah kekuatan dari dua anggota.
- d. Formasi koalisi berlangsung dalam situasi triadik, dengan demikian ada suatu kondisi pra-koalisi di setiap triad (Caplow dalam *Jurnal A Theory of Coalition in The Triad*, 1986).

## 3. Teoritikal Terbentuknya Koalisi Partai Politik

Teori koalisi mengajarkan bahwa tidak semua partai layak untuk dijadikan anggota rekanan dalam pembentukan kabinet koalisi. Hanya partai-partai tertentu dapat menciptakan koalisi yang efektif dan kondusif bagi kelanjutan dan perkembangan sistem partai. (Lijphart dalam Cipto, 2000:23-27) membagi teori koalisi ke dalam lima teori utama yaitu:

- a. *Minimal Winning Coalition*  
Menurut teori *Minimal Winning Coalition*, disusun berdasarkan kecenderungan ideologi kiri hingga kanan. Koalisi, dengan demikian, dibentuk tanpa memperdulikan posisi partai dan spektrum ideologi.
- b. *Minimum Size Coalitions*  
Berdasarkan teori ini, partai dengan perolehan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk sekedar mencapai suara mayoritas.

c. *Bargaining Proposition*

Teori ini disebut juga dengan koalisi dengan jumlah partai paling sedikit maka koalisi dengan jumlah partai terkecil. Prinsip dasar koalisi ini adalah memudahkan proses negosiasi dan tawar-menawar karena anggota atau rekanan koalisinya hanya sedikit.

d. *Minimal Range Coalitions*

Dasar dari koalisi ini adalah kedekatan pada kecenderungan ideologis memudahkan partai-partai berkoalisi membentuk kabinet. Akan tetapi koalisi ini tidak mudah terbentuk karena mengabaikan perbedaan arah dan prioritas kebijaksanaan masing-masing partai.

e. *Minimal Connected Winning Coalitions*

Teori ini paling banyak diterapkan di dunia nyata. Dasar berpijak teori ini adalah bahwa partai-partai berkoalisi karena masing-masing memiliki kedekatan dalam orientasi kebijaksananya. Partai-partai akan mencari anggota koalisi dari partai yang terdekat secara ideologis dengan sendirinya tercermin pada orientasi kebijaksanaan partai.

#### 4. Motif Koalisi Partai Politik

Jumlah partai mempengaruhi tujuan koalisi dan masing-masing aktor koalisi memiliki tujuan khusus. Dalam sistem dua partai, berkoalisi merupakan sistem pengecualian. Koalisi dalam sistem dua partai biasanya terikat dengan situasi internal/eksternal yang membahayakan atau ketika dua partai tersebut menginginkan hal yang sama. Kemungkinan lain terjadinya koalisi dalam sistem dua partai adalah menyangkut koalisi isu-isu tertentu.

Sementara itu dalam sistem banyak partai tidak diperlukan koalisi jika salah satu partai memiliki suara mayoritas yang mutlak. Meskipun demikian, ada beberapa kasus bahwa partai pemenang memilih berkoalisi dengan partai lainnya untuk berbagi tanggung jawab kekuasaan, sebab koalisi dalam sistem multi partai memperkuat posisi partai di parlemen. Koalisi berfungsi memaksimalkan keuntungan, menginginkan satu hal, beberapa aktor

menganggap kemenangan lebih berarti daripada yang lainnya dan ketika tidak menguntungkan ia keluar.

Abraham De Swaan mengajukan teori koalisi yang berorientasi pada kebijakan yang menekankan betapa pentingnya ideologi partai dalam pembentukan koalisi. Mendapatkan kekuasaan di pemerintahan bukanlah tujuan akhir dari politisi partai, namun merupakan sarana untuk menjalankan program ideologis dan menerapkan kebijakan yang didasarkan pada ideologi. Sehingga ini memungkinkan bagi partai-partai yang memiliki ideologi kurang lebih sama untuk melakukan koalisi (Swaan dalam Ekawati dalam *Jurnal Koalisi Partai Islam di Indonesia Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014*, 2015).

Teori ini berbeda dengan Katz dan Mair yang menyatakan bahwa semua partai besar memiliki kepentingan yang sama, yakni memelihara kelangsungan hidup kolektif mereka dan inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan partai kartel. Kartelisasi didefinisikan sebagai situasi dimana partai-partai politik secara kolektif mengabaikan komitmen ideologis atau programatis mereka demi kelangsungan hidup mereka sebagai satu kelompok (Kartz dan Mair dalam Sumadinata dalam *Jurnal Dinamika Koalisi Partai-partai Politik di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014*, 2016).

Partai politik menjadi agen negara dan menggunakan sumber daya milik negara untuk memenuhi kepentingan kolektif partai dengan melepaskan berbagai perbedaan ideologis dan pragmatisme mereka demi kepentingan

tertentu. Teori-teori mengenai koalisi tersebut yang akan penulis gunakan untuk melihat kecenderungan partai-partai di dalam membangun koalisi. menjelang pilgub Lampung 2018.

### **C. Tinjauan tentang Pemilihan Gubernur (Pilgub)**

Pilkada bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) menjamin hak politik warga negara. Penerapan pemilukada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat. Pemilukada langsung memperkuat partisipasi politik, pengembalian pemilihan gubernur ke DPRD mematikan partisipasi politik, disamping itu pemilukada langsung memperkuat legitimasi kepala daerah (Chaniago dalam *Jurnal Mempertahankan Pilkada Langsung*, 2016).

#### **1. Pengertian Pemilihan Gubernur (Pilgub)**

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis (Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 10 tahun 2016).

Sebuah negara bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite. Pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat.

Pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum. Pemilihan Umum adalah salah satu pranata yang paling representatif atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya demokrasi. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar 1945.

## 2. Aras dan Sistem Pemilihan Umum

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas-asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsi mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien (Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017).

Di Indonesia telah berulang kali di selenggarakan pemilihan umum yang disebut sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia, baik sewaktu orde lama, orde baru dan orde reformasi. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilu, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu sistem distrik (*single-member constituency*) dan sistem proporsional/perwakilan berimbang (*multi-member constituency*) (Budiardjo, 2008:461).

## 3. Pemilihan Kepala Daerah

Seperti halnya dengan pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, sebelumnya dipilih melalui perwakilan di DPRD. Tetapi karena arus reformasi untuk penegakan demokrasi secara murni, maka pemilihan pimpinan daerah mulai tahun 2004 sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 dilakukan secara langsung oleh rakyat (*one man one vote*).

Masalah krusial yang bisa timbul dalam pilkada sehingga bisa memicu terjadinya tindak kekerasan atau anarkis, antara lain;

- a. Terjadinya pemilihan langsung menyebabkan banyak tangan yang harus ikut campur, mulai dari pemerintah, DPRD, partai politik, KPU, Petugas Pemungutan Suara (PPS), dan Pengawas Independen (Pawaslu).
- b. Pemerintah daerah juga mengatur pilkada yang tertuang dalam peraturan pemerintah, terutama bertanggung jawab atas dana dan anggaran pilkada (Cangara, 2016: 218).

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung akan mampu membawa iklim demokrasi kearah yang lebih baik jika mampu dikelola dengan benar, dan diharapkan setelah pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dilaksanakan maka akan mampu memberikan efek bagi perkembangan demokrasi menjadi lebih berkualitas, sebab kondisi awal yang mendukung peningkatan demokrasi mulai terbentuk seperti yang dikemukakan oleh Robert Dahl bahwa untuk mewujudkan demokrasi dibutuhkan kondisi awal yang memadai untuk mendukung perkembangannya, yaitu:

- a. Adanya pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala.
- b. Kebebasan untuk mengemukakan pendapat.
- c. Adanya kemudahan akses untuk memperoleh sumber – sumber informasi dan alternatifnya.
- d. Adanya otonomi asosiasional.
- e. Dibangunnya pemerintahan perwakilan.
- f. Terdapatnya hak warga negara yang inklusif. (Agustino dalam Rahmawati dalam *Jurnal Perilaku Pemilih Golput Dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat Tahun 2008, 2015*)

Pelaksanaan Pilukada secara langsung, dalam implementasinya rakyat dituntut untuk mampu berpikir kritis, arif, cerdas terhadap tawaran yang diberikan oleh para calon kepala daerah, serta menentukan siapakah yang pantas dan layak menjadi pemimpinnya. Karena itu partai politik harus

berhati-hati dalam mengajukan tokoh yang akan dijadikan sebagai calon kepala daerah, mengingat partai politik yang mengajukan tidak hanya satu maka dibutuhkan aturan main yang jelas, adil dan tidak memihak oleh lembaga atau komisi yang netral yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung. (Yuliono dalam *Jurnal Kepercayaan Masyarakat pada Partai Politik*, 2013).

Ada berbagai bentuk pemilihan sebagai proses dan praktek dari konsep demokrasi. Sistem pemilihan kepala daerah langsung yang digunakan Indonesia saat ini secara teoritis dapat dikatakan sebagai bagian dari Pemilu. Pilkada langsung dapat dikatakan sebagai pemilu karena pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah yang memiliki dua prasyarat dasar, yaitu rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon yang didukungnya dan calon-calon bersaing dalam satu medan permainan dengan aturan main yang sama.

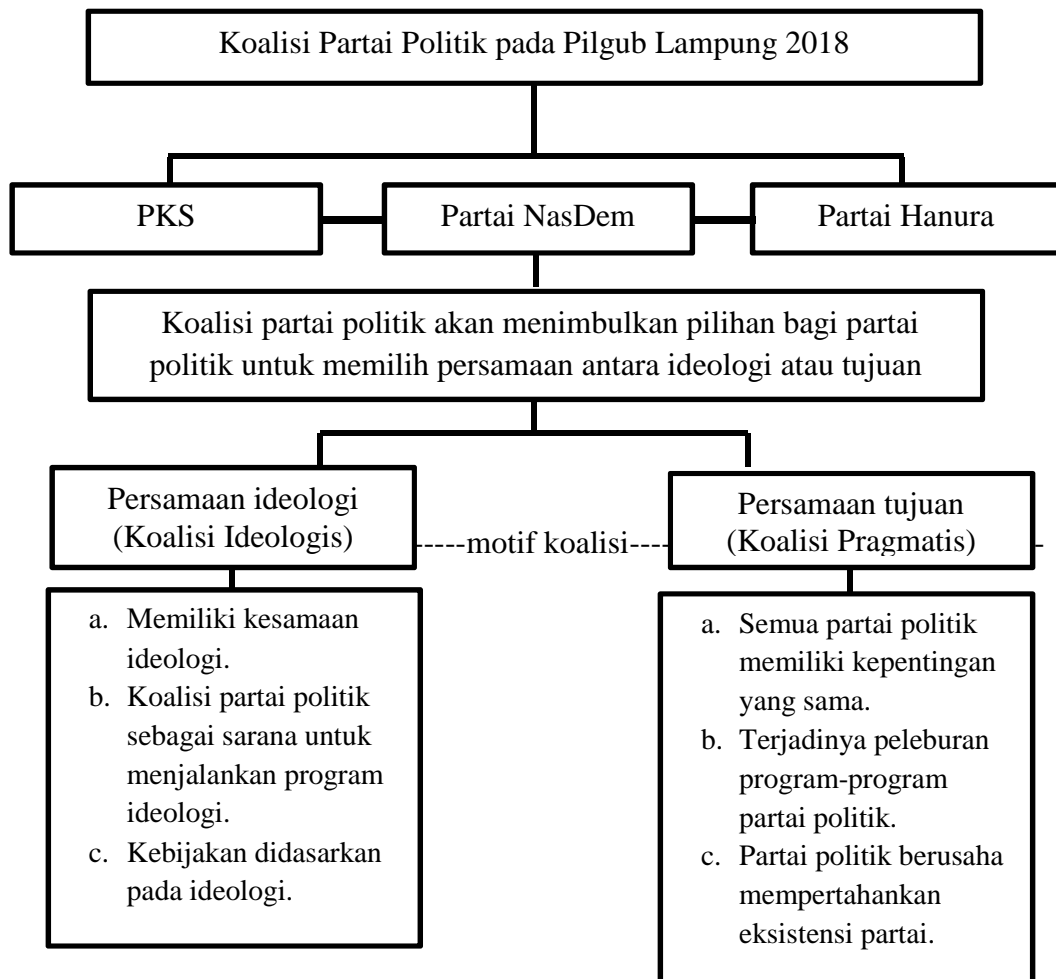
#### **D. Kerangka Pikir**

Penulis memulai kerangka pemikiran dalam penelitian yang berjudul “Analisis Motif Koalisi Partai Politik Menjelang Pemilihan Umum Gubernur Lampung 2018” ini dengan mengidentifikasi objek penelitian terlebih dahulu. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Keadilan Sosial (PKS) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).



*Grand Theory* dalam penelitian ini adalah pemikiran Muller dan Storm (1999) dalam *Policy, Office, or Votes? How Political Parties in Western Europe Make Hard Decisions*, menjelaskan dilema yang berkelanjutan yang dihadapi partai politik dalam membuat keputusan berkaitan dengan konflik tujuan. Demi mempertahankan dukungan dalam pemilu, partai mungkin mengorbankan tujuannya yang lain dalam memajukan pilihan kebijakan ataupun meraih jabatan.

Selanjutnya pada *middle theory* penulis menggunakan dua teori besar dalam tujuan koalisi partai politik dengan pemikiran dua ahli yang berbeda yaitu Abraham De Swaan (1990) dengan teori koalisi politik berlandaskan ideologis dan pemikiran Kartz dan Mair (1995) tentang pragmatisme dalam koalisi partai politik. Berikut adalah kerangka pikir penelitian:



**Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Motif Koalisi Partai Politik dalam Menghadapi Pemilihan Umum Gubernur Lampung 2018**

Sumber: Diolah Peneliti 2017

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan (ilmiah) yang ditempuh melalui serangkaian proses yang panjang (Bungin, 2011:75). Penelitian terhadap analisis motif koalisi partai politik dalam menghadapi pillgub Lampung 2018 menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Istilah penelitian kualitatif menurut Krik dan Miller pada mulanya bersumber dari pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif (Krik dan Miller, 1986:9). Pengamatan kuantitatif melibatkan diri pada angka atau perhitungan dan kuantitas. Di pihak lain, kualitas menunjuk segi alamiah yang dipertentangkan dengan kuantum atau jumlah tersebut.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong, 2014:5). Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai jenis penilaian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiarto, 2015:8).

Argumen peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu: pertama, analisis sangat membutuhkan informasi ataupun masukan yang didapat dari metode wawancara. Kedua, pengkajian mengenai koalisi partai politik ini membutuhkan data lapangan yang sifatnya tidak statistik atau tidak diperhitungkan dalam sistem angka.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pertimbangan bahwa dalam metode ini memiliki dasar-dasar filosofis yang sebagaimana dikemukakan oleh (Arikunto dalam Fuad dan Nugroho, 2014:55):

1. Fenomenologis artinya kebenaran sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti.
2. Interaksi simbolik yang merupakan dasar kajian sosial yang sangat berpengaruh dan digunakan dalam penelitian kualitatif. Ada empat premis dalam hal ini; dasar manusia bertindak adalah untuk memenuhi kepentingannya, proses suatu tindakan seseorang pada prinsipnya merupakan produk atau hasil proses sosial ketika orang tersebut berinteraksi dengan orang lain, manusia bertindak dipengaruhi fenomena lain yang muncul lebih dulu atau bersamaan dan kebudayaan mempengaruhi perilaku dan tindakan manusia.

## **B. Fokus Penelitian**

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Pada dasarnya penentuan masalah bergantung pada paradigma apakah yang dianut oleh seorang peneliti (Lincoln dan Guba dalam Moleong, 2014:93). Masalah adalah lebih dari sekedar pertanyaan, dan jelas berbeda dengan tujuan. Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan suatu jawaban (Lincoln dan Guba, 1985:218).

Penelitian ini, peneliti melakukan analisis dengan menggunakan motif koalisi partai politik yang berasal dari pemikiran Wolfgang Muller dan Kaare Strom mengenai salah satu hal yang akan dikorbankan sebuah partai politik dalam berkoalisi antara ideologinya atau kepentingannya. *Middle theory* yang menjadi fokus penelitian ini penulis pilih dari pemikiran Abraham De Swaan serta Kartz dan Mair dengan alasan bahwa baik motif ideologis ataupun pragmatis merupakan dua hal yang sama-sama penting bagi sebuah partai politik, namun dalam keadaan tertentu salah satu harus dikorbankan, saat akan berkoalisi misalnya. Oleh sebab itu maka fokus penelitian yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Motif Koalisi Ideologis (Abraham De Swaan)

Teori ini menekankan koalisi yang berorientasi pada kebijakan yang menekankan betapa pentingnya ideologi partai dalam pembentukan koalisi (Swaan dalam Ekawati dalam *Jurnal Koalisi Partai Islam di Indonesia Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, 2015*). Motif koalisi ideologis memiliki indikator yaitu; koalisi dengan kesamaan ideologi, koalisi partai politik sebagai sarana untuk menjalankan program ideologi partai dan dalam koalisi partai politik kebijakan didasarkan pada ideologi.

#### 2. Motif Koalisi Pragmatis (Kartz dan Mair)

Teori ini menekankan bahwa semua partai besar memiliki kepentingan yang sama, yakni memelihara kelangsungan hidup kolektif mereka (Kartz dan Mair dalam Sumadinata dalam *Jurnal Dinamika Koalisi Partai-partai*

*Politik di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014, 2016*). Motif koalisi pragmatis memiliki indikator yaitu; dalam koalisi semua partai politik memiliki kepentingan yang sama, dalam koalisi partai politik terjadi peleburan program-program partai dan dalam koalisi setiap partai politik berusaha mempertahankan eksistensi partai.

### **C. Informan**

Memahami kancah penelitian yang lebih dalam, peneliti harus berpikir untuk menemukan sumber data atau informan yang tepat (*key informan*). Selain itu peneliti juga memahami sumber data maupun kancah penelitian dengan *verstehen*. Dalam perspektif fenomenologis, *versthen* sangat diperlukan peneliti didalam kancah penelitian. *Versthen* adalah cara memahami situasi yang ditemui dilapangan (Fuad dan Nugroho, 2014:9).

Peneliti memahami sesuatu menurut tafsiran atau interaksi orang-orang. Pendekatan *verstehen* pada tahap eksploratif, peneliti harus memiliki pemahaman yang mendalam untuk mengenal norma-norma dari nilai yang berlaku bagi kelompok yang diteliti, sehingga peneliti tidak keliru menafsirkan makna objek yang diteliti (Glaser dan Strauss, 1967:34). Sementara itu, informan didefinisikan sebagai mereka yang berperan, yang pengetahuannya luas tentang daerah atau lembaga tempat penelitian (Moleong, 2014: 199).

Peneliti memfokuskan informan pada elit-elit partai yang berkoalisi satu sama lain, pengamat politik, wartawan senior, serta staff KPU dan Bawaslu. Berikut adalah data informan dalam penelitian ini:

**Tabel 7. Data Informan Dalam Penelitian**

No	Nama Informan	Jabatan Dalam Instansi
1	Edwin Hanibal	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai NasDem DPW Lampung
2	Antoni Imam	Ketua Majelis Pemenangan Pemilu dan Pilkada PKS DPW Lampung
3	Umar Ali	Ketua Tim Pilkada Daerah Partai Hanura DPP Lampung
4	Ari Darmastuti	Pengamat Politik Universitas Lampung
5	Yoso Muliawan	Wartawan Politik Tribun Lampung
6	Eka Wijaya	Wartawan Politik Tegar TV Lampung

Sumber: Diolah Peneliti (2017)

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lofland dalam Moleong, 2014:157). Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian.

Secara umum data penelitian dibagi kepada 2 (dua) jenis, yakni:

#### 1. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan.

#### 2. Data Sekunder

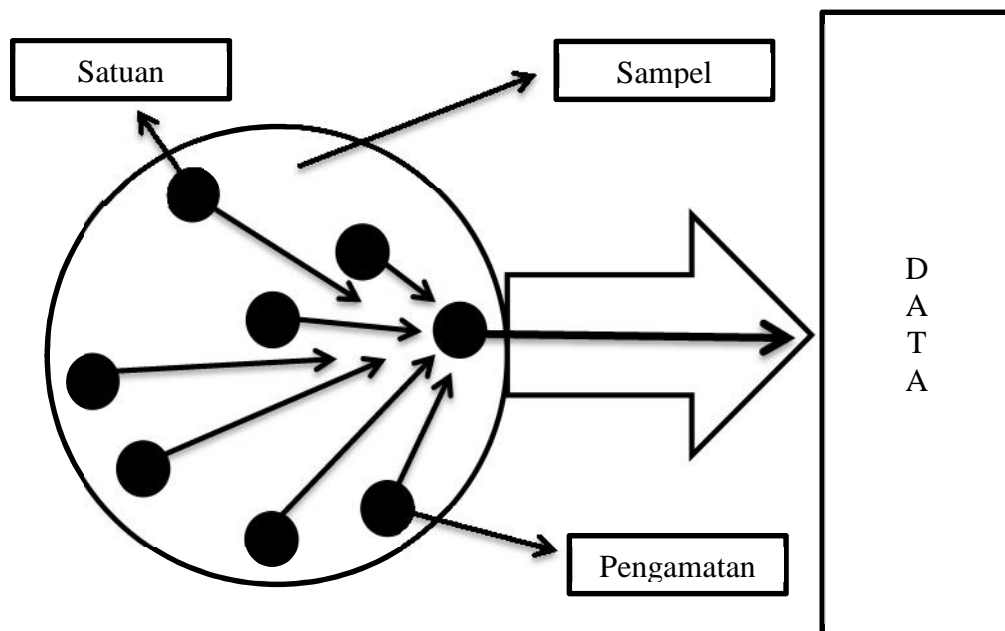
Data sekunder merupakan data yang melengkapi informasi yang didapat dari sumber data primer berupa:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota.
- b. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Keadilan Sosial (PKS) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
- c. Surat Keputusan (SK) Partai NasDem, PKS dan Partai Hanura terkait koalisi menjelang pilgub Lampung 2018.
- d. Artikel-artikel yang didapat dari surat kabar, majalah, website, dan sebagainya.



### E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jawaban itu masih perlu diuji secara empiris, dan untuk maksud inilah dibutuhkan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Data itu dikumpulkan oleh sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Sampel tersebut terdiri atas sekumpulan unit analisis sasaran penelitian yang digambarkan dalam gambar berikut:



**Gambar 2. Proses Pengumpulan Data**

Sumber: (Gulo, 2002:111)

Adapun teknik pengumpulan data yang akan diaplikasikan sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode obseravasi (Bungin, 2011:100).

Wawancara juga diartikan sebagai bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi terjadi secara langsung dalam bentuk tatap muka sehingga gerak dan miimik responden merupakan pola media yang melengkapi jata-kata secara verbal (Gulo, 2002:119). Wawancara terbagi menjadi wawancara tidak terstruktur dan wawancara semi terstruktur (Halperin dan Heath, 2017:288-289).

Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara adalah melalui wawancara peneliti dapat berkomunikasi secara langsung dengan narasumber melalui tatap muka serta gestur dan mimik tubuh narasumber dapat terlihat langsung sebagai bentuk pernyataan komunikasi verbal. Melalui wawancara, data yang didapatkan lebih akurat dan langsung dari sumbernya. Metode wawancara peneliti aplikasikan yaitu saat peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan memakai panduan wawancara.

## 2. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati fenomena yang terjadi. Jenis observasi terbagi menjadi observasi partisipan (*participant observation*), partisipasi non-partisipan (*non-participant observation*) dan observasi terhadap objek (Widi, 2010:237-238).

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan dikarenakan peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan atau aktifitas kelompok yang diteliti sebab menyusun strategi dan rencana koalisi suatu partai politik dalam menghadapi pemilihan umum sifatnya rahasia dan tertutup. Teknik observasi digunakan untuk melihat data-data primer berupa peristiwa atau simulasi tertentu pada lokasi penelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian. Selain itu dalam observasi peneliti juga melakukan pencatatan tentang hasil pengamatan atas gambaran-gambaran yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis mendalam.

Alasan peneliti menggunakan teknik observasi dalam pengumpulan data adalah menyelidiki atau mengamati hal-hal yang tidak di dapat pada saat wawancara. Melalui metode ini peneliti bisa mengamati langsung fenomena ataupun data-data lain yang bentuknya non-wawancara sebagai data tambahan yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

### 3. Dokumentasi

Dokumen dan *record* dibedakan definisinya oleh (Guba dan Lincoln dalam Moleong, 2014:216-217) sebagai berikut:

“*Record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.”

“Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film lain dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.”

Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti akurat penelitian bahwa peneliti telah benar-benar melakukan teknik pengumpulan data melalui beberapa metode dan jawaban atas panduan wawancara yang peneliti susun memang berdasarkan jawaban narasumber. Dikumentasi juga menjadi acuan peneliti untuk melihat data-data berupa fenomena yang diabadikan dalam jangka waktu yang belum begitu lama. Aplikasi dari metode dokumentasi yaitu artikel-artikel yang dibaca peneliti mengenai koalisi partai yang bersangkutan serta AD/ART dari partai yang bersangkutan.

### **F. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut (Efendi dkk dalam Singarimbun, 1995: 240) terdiri dari:

### 1. *Editing*

*Editing* adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan.

### 2. Interpretasi Data

Pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran penulisan juga ditentukan agar relevan dengan hasil penelitian.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Neuman, 2014:477). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interaktif yang terdiri dari beberapa langkah yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

prosedur reduksi data sebagai tahap pemilihan data-data penting, *display* data sebagai tahap penyajian data, dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses tersebut dijabarkan menurut (Milles dkk, 1992:17) yaitu sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

### 2. *Display* (Penyajian Data)

Catatan-catatan penting dilapangan disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan peneliti pada penyajian data adalah data yang didapat disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu.

### 3. Verifikasi Data

Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah diuji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari, arti, makna dan menjelaskan apa yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian.

Kegiatan peneliti dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses display data.

## **H. Teknik Validasi/Keabsahan Data**

Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana dikemukakan Moleong (2014:324) yang dalam pemeriksaan data menggunakan empat kriteria:

### **1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)**

Penetapan derajat kepercayaan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan untuk memeriksa derajat kepercayaan penelitian salah satunya melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori (Denzin dalam Patton, 2015:331).

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, hal itu dapat dicapai dengan jalan (Patton dalam Moleong, 2014:331):

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.

- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

## 2. Keteralihan (*Transferability*)

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraiannya harus mengungkapkan secara khusus agar dapat dipahami. Temuan tersebut merupakan penafsiran yang dilakukan dalam bentuk uraian rinci dengan segala macam pertanggungjawaban.

## 3. Kebergantungan (*Dependality*)

Merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif. Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai. Semakin tinggi tingkat reliabilitas yang tercapai maka semakin baik pula penelitian tersebut.

## 4. Kepastian (*Confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian oleh banyak orang maka hasil penelitian tidak lagi bersifat subjektif tapi sudah objektif.



## **IV. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

### **A. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)**

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.

Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah Pilkada DKI Jakarta tahun 2007. Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (detiknews.com diakses pada 4 Januari 2018 pukul 15:18 WIB).

## **B. Sejarah Pemilihan Gubernur (Pilgub) Langsung Provinsi Lampung**

### **1. Pilgub Langsung Provinsi Lampung Tahun 2008**

Pasca dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah baik provinsi, kota ataupun kabupaten memiliki otoritas untuk mengatur kewenangan daerahnya masing-masing. Begitu juga halnya dalam hal memilih kepala daerah, setiap daerah diberikan kebebasan untuk memilih kepala daerah secara langsung tanpa diwakilkan lagi oleh DPRD seperti sebelumnya.

Provinsi Lampung, untuk pertama kalinya melakukan Pilgub langsung pada 24 Juli 2008. Pilgub kali itu diikuti oleh tujuh pasang calon gubernur dan wakil gubernur. Koalisi antarpantai juga sudah mulai terlihat. Ada gabungan-gabungan partai yang mendukung calon tertentu untuk maju dalam pilgub namun ada juga calon yang berasal dari non-partai atau independen. Pilgub langsung pertama di Provinsi Lampung tahun 2008 dimenangkan oleh Sjacheroedin ZP dan M.S Joko Umar Said, berikut penulis sajikan gambaran pilgub Lampung tahun 2008 dalam bentuk tabel:

Tabel 8. Perolehan Suara Pilgub Langsung Provinsi Lampung Tahun 2008

No	Nama Paslon	Jumlah Suara SAH Paslon	Persentase Suara SAH Paslon	Partai Pengusung Paslon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Zulkifli Anwar dan Akhmadi Sumaryanto	541.962 suara	15.49%	Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
2.	Muhajir Utomo dan Andi Arief	119.392 suara	3.41%	Independen
3.	M. Alzier Dianis Thabranie dan Bambang Sudibyo	729.434 suara	20.62%	Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
4.	Oemarsono dan thomas Azis Riska	181.005 suara	5.17%	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK), Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme. Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Pelopor, Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dan Partai Damai Sejahtera (PDS)
5.	Andy Achmad Sampurna Jaya dan H.M Suparjo	342.300 suara	9.78%	Partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi (PBR)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Sjacheroedin Z.P dan M.S Joko Umar Said	1.513.000 suara	43.27%	PDI Perjuangan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSO), Partai Persatuan Daerah (PPD). Partai Patriot dan Partai Indonesia Baru (PIB)
7.	Sofjan Jacob dan Bambang Waluyo	78.636	2.25%	Independen

Sumber: KPUD Provinsi Lampung Tahun 2008

## 2. Pilgub Langsung Provinsi Lampung Tahun 2014

Pemilihan umum Gubernur Lampung tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 berbarengan dengan penyelenggaraan pemilihan umum legislatif Indonesia tahun 2014 (okezone.com diakses pada 4 Januari 2018 pukul 16: 52 WIB). Sebelumnya, pilgub Lampung direncanakan akan diselenggarakan pada 27 Februari 2014 untuk memilih lima kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung tahun 2014-2019 (kompas.com diakses pada 4 Januari 2018 pukul 16:55 WIB).

Pelaksanaan pilgub Lampung pada tahun 2014 sempat mengalami penundaan beberapa kali. Terkait dengan habisnya masa jabatan Sjacheroedin ZP pada 2 Juni 2014 dan juga akan digelarnya pemilihan umum legislatif pada April 2014, agar tidak mengganggu tahapan pemilu legislatif maka sedianya Pilgub diselenggarakan pada tahun 2013 namun

APBD Lampung untuk pilgub Lampung belum tersedia maka sulit jika dilaksanakan pada tahun 2013.

Awalnya pilgub Lampung direncanakan akan diselenggarakan pada 28 Oktober 2013, kemudian ditunda menjadi 2 Desember 2013, namun setelah dilakukan rapat tertutup antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi Lampung, akhirnya pilgub ditunda hingga tahun 2014. Kemudian KPUD Lampung menetapkan penyelenggaraan pemilu pada 27 Februari 2014. Rencana pilgub pada 27 Februari 2017 kembali gagal dan akhirnya disepakati pilgub digelar 9 april berbarengan dengan pemilu legislatif 2014 ([republika.co.id](http://republika.co.id) diakses pada 4 Januari 2018 pukul 17:11 WIB). Pilgub lampung 2014 dimenangkan oleh pasangan Ridho-Bachtiar, berikut penulis sajikan gambaran hasil pilgub Lampung 2014 dalam bentuk tabel:

**Tabel 9. Perolehan Suara Pilgub Langsung Provinsi Lampung Tahun 2014**

No	Nama Paslon	Jumlah Suara SAH Paslon	Persentase Suara SAH Paslon	Partai Pengusung Paslon
1.	Berlian Tihang dan Mukhlis Basri	606.566 suara	14.81%	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan 4 parpol non parlemen
2.	Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri	1.816.533 suara	44.96%	Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan 10 parpol non parlemen
3.	Herman HN dan Zainudi Hasan	1.342.763 suara	33.12%	Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, Partai Bintang Reformasi (PBR) dan 18 parpol non parlemen
4.	Alzier Dianis Thabranie dan Lukman Hakim	288.272 suara	7.11%	Partai Golkar dan Partai Hati nurani Rakyat (Hanura)

Sumber: KPUD Provinsi Lampung Tahun 2014

### 3. Pilgub Langsung Provinsi Lampung Tahun 2018

Pesta demokrasi di Provinsi Lampung sebentar lagi akan tiba. Pemilihan gubernur atau yang akrab disapa pilgub rencananya akan direalisasikan pada 27 Juni 2018 mendatang. Seperti yang banyak pengamat politik katakan, tahun 2018 adalah tahun demokrasi karena pilkada serentak kembali terjadi di kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Menjelang pilgub Lampung 2018, kabar demi kabar kembali mecuat, dinamika politik di Provinsi *Sang Bumi Ruwa Jurai* semakin terlihat dan tepat pada 8 Januari 2018 pendaftaran resmi bakal calon Gubernur Lampung dan bakal calon Wakil Gubernur Lampung dibuka oleh KPU.

Terdapat empat pasang calon gubernur dan wakil gubernur yang akan memperbutkan “BE 1 dan BE 2” di Provinsi Lampung. Unikny lagi, pada pilgub kali ini, tidak ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang independen, semuanya didukung oleh partai politik dan koalisi partai politik. Calon gubernur pertahana atau yang lebih kita kenal dengan M. Ridho Ficardo yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Lampung kembali mencalonkan diri menjadi Gubernur Lampung untuk periode selanjutnya.

Selanjutnya ada Herman HN yang juga saat ini sedang menjabat sebagai Wali Kota Bandar Lampung kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Lampung setelah pada pilgub lalu Herman HN mengalami kekalahan. Ada pula Arinal yang datang dari kalangan politisi khususnya elite Partai Golkar. Terakhir, ada Mustafa yang saat ini juga sedang menjabat sebagai Bupati

Lampung Tengah juga mencalonkan diri sebagai Gubernur Lampung. Koalisi partai politik pendukung Mustafa yang penulis jadikan objek penelitian kali ini. Berikut adalah empat pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2019-2024:

**Tabel 10. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2019-2024**

<b>Nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung</b>	<b>Jabatan yang Sedang/Pernah Diduduki Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung</b>	<b>Partai Politik Pengusung</b>	<b>Jumlah Kursi Keseluruhan</b>
Mustafa	Bupati Lampung Tengah, Ketua NasDem DPW Lampung	NasDem, PKS, Hanura	18 kursi
Ahmad Jajuli	Anggota DPD RI, kader PKS		
Herman HN	Wali Kota Bandar Lampung, kader PDIP	PDIP	17 kursi
Sutono	Mantan Sekretaris Daerah Lampung		
M. Ridho Ficardo	Gubernur Lampung, Ketua Demokrat DPD Lampung	Demokrat, PPP, Gerindra	25 kursi
Bachtiar Basri	Wakil Gubernur Lampung		
Arinal Djunaidi	Mantan Sekretaris Daerah Lampung, Ketua Golkar DPD Lampung	Golkar, PKB dan PAN	25 kursi
Chusunia Chalim	Bupati Lampung Timur		

Sumber: teraslampung.com dikutip pada 20 Februari 2018 pukul 10:14 WIB

### C. Partai NasDem

Partai NasDem adalah sebuah partai politik di Indonesia berideologi Pancasila yang baru diresmikan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 26 Juli 2011 (AD/ART Partai NasDem Pasal 1). Partai ini didukung oleh Surya Paloh yang merupakan pendiri organisasi bernama sama yaitu Nasional Demokrat (inilah.com diakses pada 11 November 2017 pukul 19:15 WIB).



Guna mendapatkan status resmi sebagai badan hukum, Partai NasDem didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia pada bulan Maret 2011. Kelahiran Partai NasDem tidak bisa dipisahkan lepas dari visi dan misi utama organisasi kemasyarakatan (ormas) Nasional Demokrat, yaitu menggalang Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia.

Pada Januari 2013, KPU menetapkan 10 partai politik yang lolos tahapan verifikasi administrasi dan faktual, dan menjadikan Partai NasDem sebagai satu-satunya partai baru yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014 (detikNews.com diakses pada 11 November 2017 pukul 19:20 WIB). Partai NasDem memakai konsep Restorasi Indonesia sebagai salah satu kegiatan andalannya.

#### 1. Visi Partai NasDem

Memantapkan eksistensi negara, memperkuat persatuan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mendorong keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (AD/ART Partai NasDem Pasal 4).

#### 2. Misi

- a. Membangun Politik Demokratis Berkeadilan berarti menciptakan tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan. Mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa, serta melakukan perubahan menuju efisiensi sistem pemilihan umum. Memantapkan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan masyarakat. Melakukan reformasi hukum dengan menjadikan konstitusi UUD 1945 sebagai kontrak politik kebangsaan.

- b. Menciptakan Demokrasi Ekonomi melalui tatanan demokrasi ekonomi maka tercipta partisipasi dan akses masyarakat dalam kehidupan ekonomi negara, termasuk di dalamnya distribusi ekonomi yang adil dan merata yang akan berujung pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Menjadikan Budaya Gotong Royong sebagai karakter bangsa. Dalam mewujudkan ini maka sistem yang menjamin terlaksananya sistem pendidikan nasional yang terstruktur dan menjamin hak memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. (AD/ART Partai NasDem Pasal 5).

### 3. Tujuan Partai NasDem

Partai NasDem bertujuan mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkeadilan dan berkedaulatan (AD Partai NasDem pasal 8).

### 4. Fungsi Partai NasDem

Dengan semangat kebangsaan Partai berfungsi untuk:

- a. Memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Mewujudkan negara kesejahteraan sesuai mandat konstitusi.
- c. Mengembangkan kehidupan politik kebangsaan yang demokratis, partisipatif dan beradab.
- d. Menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip Demokrasi Ekonomi.
- e. Menegakkan keadilan sosial dan kedaulatan hukum.
- f. Memenuhi hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia.
- g. Mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan sosial budaya yang egaliter berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika (AD Partai NasDem pasal 9).

## 5. Struktur Pengurus Partai NasDem DPW Lampung

Tabel 11. Struktur Pengurus Partai NasDem DPW Lampung

Bidang/Dewan Partai	Jabatan Dalam Partai	Nama Kader Partai
	Ketua	Dr. Ir. Mustafa
	Sekretaris	H.Fauzan Sibron, S.E, Akt.
	Bendahara	Tampan Sujarwadi
Dewan Pertimbangan Wilayah	Ketua	H. Zamzani Yasiin
Dewan Pakar Wilayah	Ketua	Dr. H. Agus Istiqlal, M.H.
Dewan Pimpinan Wilayah	Wakil Ketua Bid. Pemilihan Umum	H. Edwin Hanibal, S.H., M.H.
	Wakil Ketua Bid. Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi	Dr. H. Yunia Putra Tubarad, S.E., M.Si.
	Wakil Ketua Bid. Media dan Komunikasi Politik	H. Mahrizal Sinaga, S.E., M.M.
	Wakil Ketua Bid. Pendidikan Politik dan Kebudayaan	Budi Yuhanda, S.H., M.Kn.
	Wakil Ketua Bid. Politik dan Pemerintahan	Drs. H. Musiran
	Wakil Ketua Bid. Pertanian dan Maritim	J.B. Geovanni
	Wakil Ketua Bid. Hukum, Advokasi dan HAM	Wahrul Fauzi Silalahi, S.H.
	Wakil Ketua Bid. Otonomi Daerah	Hj. Sahanah, S.E., M.M.
	Wakil Ketua Bid. Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat	Heru Listianto, S.Pd.
	Wakil Ketua Bid. Energi, SDA dan Lk Hidup	Ir. Ichwanto M. Nuch
	Wakil Ketua Bid. Agama dan Masyarakat Adat	Iskandar Zulkarnaen, BA
	Wakil Ketua Bid. Hubungan Antar Daerah	Arief Titita Hatang, BIB
	Wakil Ketua Bid. Ekonomi	Hj. Sahyana, S.E.
	Wakil Ketua Bid. Kesehatan, Perempuan dan Anak	Vony Reyneta Doloksaribu, S.H.
	Wakil Ketua Bid. Industri dan Tenaga Kerja	Hj. Misgustini, S.H.
	Wakil Ketua Bid. Pemuda, Mahasiswa dan Olahraga	H. Mofaje Carafeboka

Sumber: SK No. 561-SK/DPP-NasDem/X/2016 tentang susunan pengurus Partai NasDem Lampung

#### **D. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**

PKS merupakan partai yang berdiri pada masa pasca Orde Baru, dideklarasikan pada April 2003 sebagai keberlanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang pada pemilu 1999 tidak mendapat dukungan signifikan dari pemilih. Partai ini didirikan oleh orang-orang dengan latar belakang aktivis keagamaan berbasis kampus, terutama sekali di kampus-kampus sekuler. Basis pendukung PKS adalah pembilahan sosial dengan karakteristik kelas menengah atas, kaum terdidik dan Islam (Pamungkas, 2011: 137).

PKS merupakan partai dengan basis ideologi Islam modernis dan dengan pengorganisasian partai yang solid. Pemikiran pemikiran Ikhwanul Muslimin sangat mewarnai partai (Ranhony, 2006: 55). Dalam debat-debat regulasi partai ini banyak mengartikulasikan kepentingan-kepentingan politik Islam. Meskipun demikian, partai ini relatif inklusif dalam membangun kerjasama dengan partai lain seperti terlihat dalam koalisi pilkada dan program partai

##### **1. Visi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**

Visi Partai adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (AD/ART Partai Keadilan Sejahtera Pasal 5).

## 2. Misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Misi Partai adalah menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (AD/ART Partai Keadilan Sejahtera Pasal 6).

## 3. Tujuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Tujuan Partai, yaitu terpenuhinya hak, kewajiban, dan tanggung jawab politik setiap Anggota sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia (AD/ART Partai Keadilan Sejahtera Pasal 7).

## 4. Fungsi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai berfungsi sebagai:

- a. Wahana untuk bekerja dalam menyelenggarakan pendidikan politik;
- b. memperjuangkan dan membela kepentingan politik masyarakat, bangsa, dan negara; serta
- c. memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (AD/ART Partai Keadilan Sejahtera Pasal 8).

## 5. Sktruktur Penguru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPW Lampung

**Tabel 12. Sktruktur Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPW Lampung**

<b>Majelis/Dewan Partai</b>	<b>Jabatan Dalam Partai</b>	<b>Nama Kader Partai</b>
Dewan Pengurus Wilayah	Ketua Umum	H. Ahmad Mufti Salim, LC., M.A.
	Wakil Ketua Umum	Ir. H. Akhmadi Sumaryanto
	Sekretaris Umum	H. Ade Utami Ibnu, S.E.
	Bendahara Umum	H. Yusuf Efendi, S.E.
	Bidang Kaderisasi	H. Agus Kurniawan, S.T.
	Bidang Pemberdayaan SDM dan Lembaga Profesi	H. Marsudianto, S.Pd., M.Si.
	Bidang Kepemudaan	M. Suhada, S.Si
	Bidang Seni dan Budaya	Cucu Mulyono
	Bidang Olahraga	Matrono
	Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga	Tri Sakti Wijayana, S.Pd
	Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada	H. Antoni Imam, S.E.
	Bidang Hubungan Masyarakat	Linda Wuni, S.T.P
	Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	H. Mardani Umar, S.H., M.H.
	Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup	Grafieldy Mamesah, S.Si.
	Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah	Yulianto, S.E.
	Bidang Kesejahteraan Rakyat	H. Nandang Hendrawan, S.E.
	Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader	H. Yusnadi, S.T.
Bidang Pekerja Petani dan Nelayan	Dikti Ariansyah, S.T.P.	
Majelis Pertimbangan Wilayah	Ketua MPW	Ir. H. Hantoni Hasan, M.Si.
	Sekretaris MPW	H. Johan Sulaiman, MM.
Dewan Syariah Wilayah	Ketua DSW	H. Komirudin Imron, LC
	Sekretaris DSW	H. Hilmudin Sulani, LC

Sumber: SK Nomor 424/SKEP/DPP-PKS/1437 tentang Struktur Kepengurusan Majelis Pertimbangan Wilyah, Dewan Syariah Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahteran Provinsi Lampung Periode 2015-2020

### **E. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)**

Awal berdirinya partai ini tak lepas dari gagasan Jendral Tentara Nasional Indonesia (TNI) Wiranto beserta tokoh-tokoh nasional lain. Gagasan ini kemudian dibahas dalam sebuah pertemuan yang diadakan di Jakarta pada tanggal 13-14 November 2006. Dalam pertemuan ini dihasilkan 8 kesepakatan yang menjadi tonggak berdirinya partai. Dalam 8 kesepakatan tersebut dibahas mengenai berbagai hal yang menyangkut kesejahteraan rakyat Indonesia. Pada pengumuman tanggal 21 Desember 2006 kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dalam partai politik yang kemudian diberi nama Partai Hati Nurani Rakyat atau biasa disingkat menjadi Partai Hanura ([profil.merdeka.com](http://profil.merdeka.com) diakses pada 11 November 2017 pukul 15:25 WIB).

Partai Hanura dengan ideologi pancasila (AD/ART Partai Hanura pasal 11) mempunyai visi yang terbagi menjadi 2 bagian yakni Kemandirian Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat (wikipedia). Dalam visi tersebut secara garis besar menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia terasa tidak mandiri lagi dengan banyaknya campur tangan pihak asing yang dapat merugikan kehidupan bangsa sehingga diharapkan seluruh rakyat Indonesia mampu bangkit kembali demi menciptakan sebuah bangsa yang mandiri serta selalu menanamkan dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Partai Hanura terus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar partai yang antara meliputi ketakwa-an, kemandirian, kebersamaan, kerakyatan dan kesederhanaan.

### 1. Visi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Terwujudnya bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur (AD/ART Partai Hanura pasal 16).

### 2. Misi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

- a. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa melalui penyelegaran negara yang demokratis, transparan dan akuntabel dengan senantiasa berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Melahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas dan berkemampuan dalam menjalankan tugas dengan senantiasa mengedepankan hati nurani.
- c. Menegakan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum guna melindungi kehidupan rakyat, bangsa dan negara.
- d. Membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil dan berwawasan nasional.
- e. Memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada kaum perempuan dan pemuda pada posisi strategis untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa.
- f. Membangun sistem perekonomian nasional yang berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam secara tepat guna dan berdaya guna serta membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat/
- g. Memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme secara total dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri dan bermartabat.
- h. Mengembangkan Otonomi Daerah untuk lebih memacu percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh tanah air guna memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (AD/ART Partai Hanura Pasal 17).

### 3. Tujuan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

- a. Tujuan Umum Partai adalah:
  - Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.



- Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Tujuan Khusus Partai adalah:
- Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
  - Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Tujuan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional (AD/ART Partai Hanura pasal 18).

#### 4. Fungsi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Partai berfungsi sebagai:

- a. Sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Wadah untuk mengembangkan partisipasi politik rakyat.
- e. Wadah untuk rekrutmen kader dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender (AD/ART Partai Hanura pasal 19).

## 5. Struktur Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPD Lampung

**Tabel 13. Struktur Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPD Lampung**

<b>Bidang/Dewan Partai</b>	<b>Jabatan Dalam Partai</b>	<b>Nama Kader Partai</b>
Dewan Pimpinan Daerah	Ketua	dr. H. Sri Widodo, M.Kes., Sp.PD., FINASIM
	Wakil Ketua	Ir. Hj. Nurhasanah, M.M.
	Wakil Ketua	Sukoyo, S.E.
	Wakil Ketua	Angga Jevi Surya, S.E., S.H.
	Wakil Ketua	Drs. Musa Ahmad
	Wakil Ketua	Dra, Nurma Satir
	Wakil Ketua	Yusmanto Usman
	Wakil Ketua	Drs. Miswan Gumanti, MBA
	Wakil Ketua	Chospan, S.Pd., M.M.
	Wakil Ketua	Gonio Satyalkromi, S.H., M.H.
	Wakil Ketua	H.Teddy Hartadi, S.E.
	Wakil Ketua	H.Agus Salim, ZA, S.E.
	Wakil Ketua	Hj. Nun Aini Ryamor Ryacudu
	Wakil Ketua	Ferry Susanto, S.E.
	Wakil Ketua	Abunikman, S.H.
	Wakil Ketua	Robin HB
	Wakil Ketua	HM. Iqbal, S.T.
	Wakil Ketua	Ir. Hi. Dwi Pasha Calfat
	Wakil Ketua	Sukma Mulyana, S.T., M.M.
	Wakil Ketua	Ir. H. Amiruddin Umar, S.H.
Wakil Ketua	Zulkarnain	
Dewan Penasihat Daerah	Ketua	H. Suprayitno
	Sekretaris	Drs. Nurul Sofyan
Dewan Pakar Daerah	Ketua	Dr. H. Abdurrachman Sarbini, S.H., M.H.
	Sekretaris	Hj. Gusnaini Jaya Putri, S.E.

Sumber: SK No SKEP/027/DPP-HANURA/V/2017 tentang Reposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Lampung Masa Bakti 2015-2020

## **F. Analisis Ideologi Partai Pendukung dan Partai Pengusung Mustafa – Ahmad Jazuli**

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis jelaskan, terlihat bahwa dalam hal koalisi antara partai pendukung dan partai pengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Mustafa dan Ahmad Jazuli memiliki dua ideologi berbeda. PKS berlandaskan ideologi Islam sedangkan Partai NasDem dan Partai Hanura berlandaskan ideologi Pancasila. Pada konteks ini, partai politik mungkin bisa mengambil keuntungan dari adanya era orde baru yang menjadikan Pancasila sebagai azas tunggal.

Pancasila dijadikan Soekarno pada tahun 1945 sebagai sebuah formula untuk mempersatukan bangsa yang terpecah menjadi tiga entitas besar, yakni nasionalis, Islamis dan sosialis-komunis. Sedangkan oleh Soeharto, Pancasila diinvestasikan sebagai ‘status yang hampir keramat’ sebagai ideologi pada era Orde Baru yang kemudian berakhir pada tahun 1998 dan digantikan dengan era reformasi (Bourchier dan Hadiz, 2013: 14).

Azas tunggal yang digemakan era Soeharto kemudian menjadi sebuah warisan dari meleburnya tiga kelompok ideologi pada masa kemerdekaan, yakni Nasionalis, Islamis dan Sosialisme ke dalam satu ideologi yakni Pancasila. Pancasila sebagai hal yang akhirnya menjadikan banyak organisasi termasuk partai politik yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi atau azas yang dianut.

Begitu halnya dengan organisasi Islam, termasuk dengan Partai Islam. Era orde baru telah merubah '*God-given*' *Islamis principles* menjadi *Islamic principles to the 'man-made'* Pancasila yang berlanjut hingga hari ini. Pada masa itu, tindakan ini mendapat protes keras dari kelompok Islam di akhir tahun 1970an dan awal tahun 1980an, mereka kecewa ketika mengetahui pemerintah melakukan kampanye besar untuk mengindoktrinasi masyarakat Indonesia dengan ideologi negara Pancasila (Bourchier dan Hadiz, 2013: 14).

Setelah melakukan wawancara dengan tiga partai politik yang menjadi objek penelitian penulis, dapat penulis analisis bahwa warisan ideologi Pancasila seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dapat menjadi senjata dan alat untuk memudahkan partai politik untuk berbaur dan menasionalisasikan dirinya dengan tujuan untuk memudahkan posisinya agar mendapat suara yang banyak dari berbagai kalangan. Terbukti bahwa ketiga partai sifatnya terbuka bagi setiap orang atau lembaga termasuk partai politik lain yang ingin bergabung ataupun bekerja sama selagi tujuannya secara nasional adalah untuk membangun Indonesia.

Berbicara mengenai nasionalisme, sebagai suatu gerakan ideologis untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan dan identitas bagi suatu populasi, yang sejumlah anggotanya bertekad untuk membentuk suatu bangsa yang aktual atau bangsa yang potensial (Smith, 1998: 9). Jadi, dalam konteks koalisi partai, ideologi Nasionalisme partai ini kerap kali menjadi alasan partai untuk melakukan koalisi tanpa mengedepankan ideologi dengan asumsi sentimen nasionalisme, dan disertai keuntungan politis dan finansial.

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan motif koalisi partai politik menjelang pilgub Lampung 2018 khususnya Partai NasDem, PKS dan Hanura adalah sebagai berikut:

1. Partai NasDem, PKS dan Partai Hanura menjelang pilgub Lampung 2018 melakukan koalisi dengan motif pragmatis sebab:
  - a. Motif ideologi: koalisi antara NasDem, PKS dan Hanura berkoalisi bukan berdasarkan kesamaan ideologi, koalisi antara NasDem, PKS dan Hanura bukan sebagai ajang untuk menyalurkan program ideologi dan kebijakan dalam koalisi antara NasDem, PKS dan Hanura tidak berdasarkan ideologi.
  - b. Motif pragmatis: dalam koalisi antara NasDem, PKS dan Hanura ada kepentingan partai politik yang sama, terjadi peleburan program dalam koalisi antara NasDem, PKS dan Hanura dan dalam koalisi antara NasDem, PKS dan Hanura tiap-tiap partai berusaha meningkatkan eksistensinya.

2. Bentuk pragmatisme dalam koalisi antara Partai NasDem, PKS dan Hanura yaitu; Partai NasDem menempatkan wakil terbaiknya sebagai calon Gubernur Lampung, PKS menempatkan wakil terbaiknya sebagai calon Wakil Gubernur Lampung, dan Partai Hanura mendapat porsi tersendiri dalam perumusan program-program partai dan juga mendapatkan ruang untuk tetap berkampanye memajukan nama partai menjelang pemilu 2019 mendatang.
3. Baik antara Partai NasDem, PKS ataupun Partai Hanura masih memiliki keinginan untuk berkoalisi dengan partai politik berideologi sejenis namun hal itu terkendala beberapa hal seperti; belum terpenuhinya jumlah kursi legislatif sesuai yang diajukan undang-undang sebagai syarat partai politik mengirimkan wakil terbaiknya dalam pilkada, tidak adanya calon kepala daerah yang mumpuni dari tiap partai atau adanya benturan kepentingan antara masing-masing calon kepala daerah dari tiap partai, dan peluang kemenangan masih sangat kecil.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat maka peneliti menghasilkan sejumlah saran yaitu:

1. Koalisi yang terjadi secara pragmatis berdasarkan tujuan memang sudah umum terjadi dan itu tidak disalahkan. Saran dari peneliti disini adalah dengan koalisi yang sifatnya pragmatis, tiap-tiap partai politik harus tetap memegang nilai ideologinya masing-masing dan tetap memasukkan unsur-

unsur ideologinya dalam sebuah hasil koalisi, sebab salah satu ciri khas partai yang membedakannya dengan partai lain adalah ideologinya.

Selain itu pelebagaan dalam partai politik di tingkat lokal juga perlu ditingkatkan agar masing-masing partai mampu menekankan garis ideologinya masing-masing dan tidak pudar termakan waktu sebab pelebagan partai di tingkat lokal berimbas terhadap cara partai melakukan koalisi dalam hal pemenangan pilkada.

2. Kepentingan yang sama dalam rangka pemilu ataupun pilkada memang tidak menutup kemungkinan sebuah partai politik untuk berkoalisi dalam hal pemenuhan syarat sesuai undang-undang, menghasilkan calon kepala daerah yang berkualitas tanpa terjadi benturan kepentingan didalamnya maupun dalam hal membangun kekuatan partai.

Saran dari peneliti disini adalah partai politik dalam berkoalisi meskipun sifatnya pragmatis diharapkan tidak mendominasi satu sama lain untuk mencegah terjadinya konflik antar partai. Meskipun peta pragmatisme menunjukkan perbedaan besar dan kecil porsi pragmatis yang didapat oleh masing-masing partai politik, tapi bagi partai politik yang terlibat dalam sebuah koalisi seluruhnya mempunyai sifat membutuhkan dan dibutuhkan.

# **DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU:

- Apter, David E. 1996. *Pengantar Analisa Politik*. PT Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta. 528 halaman.
- Arifin, Anwar. 2014. *Perspektif Ilmu Politik*. Pustaka Indonesia: Jakarta. 222 halaman.
- Bouchier, David dan Vedi R. Hadiz. 2003. *Indonesian Politics and Society: A Reader*. Routledge: London and New York. 326 halaman.
- Bruning, Jacqueline dan Paul Foster. 1997. *The Rule of Reasons: The Philosophy of Charles Sanders Peirce*. University of Toronto Press: Canada. 313 halaman.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT Ikrar Mandiri Abadi: Yogyakarta. 247 halaman.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah ragam Varian Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 303 halaman.
- Burke, Edmund. 1899. *The Cause of The Present Discontents 3rd edition*. The New York Public Library: New York. 118 halaman.
- Cangara, Hafied. 2016. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta. 560 hlm.
- Caton, Mathias. 2007. *Effective Party Assistance: Stronger Parties for Better Democracy*. Internastional IDEA: Swedes. 319 halaman.
- Cipto, Bambang. 2000. *Partai, Kekuasaan dan Militerisme*. Pustaka Pelajar Offset: Yogyakarta. 177 halaman.
- Dalton, Russel J dan Martin P Wattenberg. 2000. *Parties Without Partisan: Political Change in Advanced Industrial Democracies*. Oxpord University Press: New York. 312 halaman.
- Duverger, Maurice. 1984. *Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan*. Bina Aksara: Jakarta. 199 halaman.

- Dyke, Vernon Van. 1960. *Political Science: A Phylosopical Analysis*. Stanford University Press: California. 235 halaman.
- Feist, Gregory J. 2010. *Teori Kepribadian: Tehories of Personality*. Salemba Humanika: Surabaya. 440 halaman.
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. PT Graha Ilmu: Yogyakarta. 104 halaman.
- Gie, The Liang. 1978. *Ilmu Politik*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta. 129 halaman.
- Glaser, Barney G dan Anslem L Strauss. 2006. *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. A Division of Transaction Publishers: United Stated of America, London. 271 halaman.
- Gulo, W. 2010. *Metodologi Penelitian*. PT Grafindo: Jakarta. 272 halaman.
- Halperin, Sandra dan Oliver Heath. 2012. *Political Research: Methods & Practical Skills 2nd Edition*. British Library Cataloguing-in Publication Data: United State of America. 440 halaman.
- Hazan, Reuven Y dan Gideon Rahat. 2010. *Democracy Within Parties: Candidate Selectione Methods and Their Poltiical Consequence*. SPI Publisher Service: Great Britain. 212 halaman.
- Heywood, Andrew. 2000. *Key Concept in Politics*. ST. MARTIN'S PRESS LLC: United States of America. 281 halaman.
- Jurdi, Fatahullah. 2014. *Studi Ilmu Politik*. PT Graha Ilmu: Yogyakarta. 348 hlm.
- Katz, Richard S dan William Cortty. 2006. *Handbook of Party Politics*. SAGE Publication: New Delhi. 550 halaman.
- Klingemann, Hans-Dieter dkk. 2000. *Partai, Kebijakan dan Demokrasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 474 hlm.
- Kirk, Jerome dan Marc. L Miller. 1986. *Reliability and Validity in Aualitative Research*. SAGE Publications: London. 87 hlm.
- Lincoln, Yvonna. S dan Egon G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications: London. 416 halaman.
- Michels, Robert. 2010. *Political Parties: A Sociology Study of the Oligarchial Tendencies of Modern Democracy*. The Free Press: New York. 379 halaman.
- Miles, Matthew B dkk. 2014. *Qualitative Data Analysis*. Library of Congres Catalogue-in Publication Data: United Stated of America. 338 halaman.
- Moleong dan Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung. 424 halaman.

- Muller, Wolfgang dan Kaare Strom. 1999. *Policy, Office, or Votes? How Political Parties in Western Europe make hand Decisions*. Cambridge University Press: New York. 333 halaman.
- Neuman, W Laurence. 2014. *Social Reseacrh Methods: Qualitative and Quantitative Approach 7th Edition*. British Library Cataloguing-in Publication Data: United State of America. 640 halaman.
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Institute for Democracy and Welfarism: Yogyakarta. 253 halaman.
- Patton, Michael Quinn. 2015. *Qualitative Research & Evaluation Methods 4th Edition*. Library of Congres Catalogue-in Publication Data: United Stated of America. 598 halaman.
- Pratikno. 2009. *Political parties in Pilkada: Some Problem for Democratic Consolidation*. ISEAS: Singapore. 121 halaman.
- Sartori, Giovanni. 1976. *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. British Library Cataloguing in Publication Data: Cambridge. 368 halaman.
- Schumpeter, Joseph A. 2003. *Capitalism, Socialism & Democracy*. British Library Cataloguing-Publication Data: United Stated of America. 460 halaman.
- Simon, Janos. 2003. *The Change of Funcition of Political Parties at The Turn of Millenium*. Institut de Ciencies Politiques i Socials: Barcelona. 35 halaman.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES: Jakarta. 336 halaman.
- Smith, D. Anthony. 2003. *Nationalism and Modernism*. Routledge: New York. 244 halaman.
- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. CV Solusi Distribusi: Yogyakarta. 228 halaman.
- Surbakti, Ramlan. 2012. *Memahami Ilmu Politik*. PT Gramedia Utama: Jakarta. 331 halaman.

## **JURNAL:**

- Caplow, Theodore. 1986. *Jurnal A Theory of Coalitions in The Triad*.
- Chaniago, Pangi Syarwi. 2016. *Jurnal Mempertahankan Pilkada Langsung Vol 2 No 1*.
- Ekawati, Esty. 2015. *Jurnal Koalisi Partai Islam di Indonesia Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dalam Jurnal Penelitian Politik Vol 12 No 1*.
- Giorgi, Elisabetta De. 2007. *Jurnal Parliamentary Oposition in Western European Democracies Today: Systemuc or Issue-Oriented?*
- Loso dkk. 2013. *Jurnal Anlasis Kegagalan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Memperebutkan Kursi di DPRD Kabupaten Batang Vol 1*.
- Omotola, J. Shola. 2010. *Jurnal Political Parties and Quest for Political Stability in Nigeria*.
- Prasetya, Imam Yudhi. 2011. *Jurnal Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik Vol 1 No 1*.
- Rahmawati, Tatik. 2015. *Jurnal Perilaku Pemilih Golput Dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat Tahun 2008 Vol 5 No 2*.
- Strom, Kaare. 1990. *Jurnal A Behavioral Theory of Competitive Political Parties, (American Journal Of Political Science), Vol 34*.
- Sumadinata, R. Widya Setiabudi. 2016. *Jurnal Dinamika Koalisi Partai-partai Politik di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014*.
- Susilawan, Muhammad Andi. 2015. *Jurnal Tinjauan Yuridis terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*.
- Winasih, Ni Wayan Indra dkk. 2015. *Jurnal Peran Partai Politik dan Kalkulasi Elit terhadap Karakteristik Koalisi*.
- Yuliono, Anton. 2013. *Jurnal Kepercayaan Masyarakat Pada Partai Politik Vol 11 No 1*.

## **PRODUK HUKUM:**

AD/ART Partai NasDem

AD/ART Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

AD/ART Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## **ARTIKEL-ARTIKEL:**

3, Admin. 2017. *NasDem Optimis Hanura Tetap Bersama* dalam [translampung.com](http://translampung.com) edisi 1 November 2017.

3, Admin. 2017. *Rekom Mustafa Terancam Dicabut* edisi 31 Oktober 2017.

Andwika, Rizky. 2018. *Nomor Urut Empat Pasangan Calon Pilgub Lampung* dalam [merdeka.com](http://merdeka.com) edisi 14 Februari 2018.

Anm. 2017. *Mustafa: Koalisi Lampung KECE Tetap Solid* dalam [pelitaekspres.com](http://pelitaekspres.com) edisi 14 Desember 2017.

Belarminus, Robertus. 2018. *Mustafa Terjerat OTT KPK, NasDem Galau Jalani Pilkada Lampung* dalam [kompas.com](http://kompas.com) edisi 16 Februari 2018.

Belarminus, Robertus. 2018. *Pasca OTT, Bupati Lampung Tengah Mundur dari Jabatan Ketua DPW NasDem* dalam [kompas.com](http://kompas.com) edisi 16 Februari 2018.

Berita 24, Redaksi. 2017. *Koalisi Tiga Parpol, Lampung KECE Berlayar Menangkan Mustafa* dalam [berita24.id](http://berita24.id) edisi 16 Oktober 2017.

Berlian, Pena Redaksi. *Koalisi Lampung Kece Siap Sukseskan Mustafa, di Pilgub Lampung* edisi 17 Oktober 2017.

Darmajati, Danu. 2018. *Cagub Mustafa di Lampung Tersangka, Hanura Ingin Alihkan Dukungan* dalam [detiknews.com](http://detiknews.com) edisi 17 Februari 2018.

- Fatmawati, Nur Indah, 2018. *Ditahan KPK, Bupati Lampung Tengah: Memang Cobaan Hidup Saya* dalam detiknews.com edisi 16 Februari 2018.
- Fdn dan Mad. 2013. *Partai NasDem Optimis Masuk 3 Besar di Pemilu 2014* dalam detik.com edisi 11 Januari 2013.
- Hakim, Nur Rakhmat. 2018. *Beda Koalisi di Pusat dan di daerah Bentuk Pragmatisme Politik, tetapi Wajar* dalam Kompas.com edisi 8 Januari 2018.
- Hatta, Raden Trimulia. 2018. *Pilgub Lampung, Mustafa-Ahmad Jazuli ke KPU Naik Gajah* dalam liputan6.com edisi 8 Januari 2018.
- Hazliansyah. 2017. *Pasangan Balon Gubernur Lampung ini akan Naik Gajah ke KPU* dalam republik.co.id edisi 8 Januari 2018.
- Hindarto, S. Yugo. 2018. *PKS Tetap Dukung Tersangka KPK Mustafa di Pilkada Lampung* dalam cnnindonesia.com edisi 19 Februari 2018.
- Kurniawan, Dodi. 2018. *Grafis: Berebut Takhta di Bumi Ruwa Jurai* dalam tribunnews.com edisi 8 Januari 2018.
- Mubarok, Abdullah dan Bayu Hermaw. 2011. *JK Sentil NasDem, Ormas atau Partai?* Dalam inilah.com edisi 26 Juli 2011.
- Musiron. 2014. *Pemungutan Suara Pilgub Lampung 9 April 2014* dalam republik.co.id edisi 25 Februari 2014.
- Muslihah, Eni dan Kistiyarini. 2013. *KPU Lampung Tetapkan Pilgub 27 Februari* dalam Kompas.com edisi 7 Desember 2013.
- Nrl. 2012. *Dulu Pilkada Lalu Pemilukada, Kini Pilgub* dalam detiknews.com edisi 10 Juli 2012.
- Saroso, Oyos. 2018. *Inilah Peta Politik Pilgub Lampung 2018* dalam teraslampung.com edisi 15 Januari 2018.
- Sastriadi, Anggri. 2017. *Bakal Calon Gubernur Lampung Kenalkan Program KECE* dalam metrotvnews.com edisi 18 Mei 2017.
- Setiawan, Asep Budi. 2017. *Koalisi Lampung KECE Godok Wakil, Muzammil Dipastikan Tak Maju* dalam portallampung.co edisi 8 November 2017.
- Setiawan, Imam. 2017. *Koalisi Lampung Kece Siap Menangkan Mustafa* dalam metrotvnews.com edisi 16 Oktober 2017.
- Suartika, Nina. 2014. *Pilgub Lampung Digelar Bareng Pemilu Legislatif* dalam okezone.com edisi 27 Februari 2014.
- Syahreza. 2017. *Pilgub Lampung 2018, Mustafa Belum Tentukan Calon Wakil* dalam lampungpro.com edisi 17 Oktober 2017.